

2023



Griya PATEN
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Gedangan

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo



GEDANGAN
amazing

RENSTRA
RANKIR PERUBAHAN

BERITA ACARA
HASIL RANKIR PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Nomor : 188/64/438.7.4/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Bulan Mei Tahun 2023, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Camat Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/36/438.7.4/2023, tanggal 4 Januari 2023 telah melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

a. Uraian Tujuan dan Indikator Sebelum Review

TUJUAN (Sebelum Perubahan)	TUJUAN (Setelah Perubahan)	KETERANGAN
Tujuan (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Kententraman dan Ketertiban Umum)	Tujuan (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Kententraman dan Ketertiban Umum)	Tetap
Indikator : a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Indikator : a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Tetap
SASARAN (Sebelum Perubahan)	SASARAN (Sesudah Perubahan)	
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tetap
Indikator Kinerja :	Indikator Kinerja :	Baru

a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan b. Nilai SAKIP Kecamatan c. Nilai RB d. Nilai IPP e. Persentase Serapan Anggaran	a. Nilai SAKIP Kecamatan b. Nilai RB c. Nilai IPP	
Sasaran 2 : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran 2 : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tetap
Indikator Kinerja : Persentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi	Indikator Kinerja : Persentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	Baru

1. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
Nilai SKM Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pemohon / penerima layanan mengisi kuesioner melalui 	Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http://ikm.sidoarjokab.go.id/ . Dengan range penilaian sebagai berikut: a. 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik b. 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik

	<p>website</p> <p>http://ikm.sidoarjokab.go.id/.</p> <p>Nilai akan otomatis generated by system.</p>	<p>c. 76,61 – 88,30 (B) = Baik</p> <p>d. 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik</p>
Nilai SAKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat. 	<p>Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2.A untuk hasil nilai 80-90 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30
Nilai RB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Mengisi LKE dari inspektorat 	<p>Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform</p>
Nilai IPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik 	<p>Indeks penilaian sebagai Berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik

c. Rincian Target Indikator Kinerja Program Sebelum Perubahan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a. Persentase Izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan;	a. 100%	a. 100%	a. 100%	a. 100%	a. 100%	a. 100%	a. 100%
b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar;	b. 80%	b. 80%	b. 80%	b. 85%	b. 90%	b. 90%	b. 95%
c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL;	c. 100%	c. 100%	c. 100%	c. 100%	c. 100%	c. 100%	c. 100%
Persentase pelanggaran perda dan perkara yang ditangani;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

d. Rincian Target Indikator Kinerja Program Setelah Perubahan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a. Persentase Izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan;	a. 100%	a. 0 %	a. 0 %	a. 0 %	a. 0 %	a. 0 %	a. 0 %
b. Persentase pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar;	b. 80%	b. 80%	b. 80%	b. 85%	b. 90%	b. 90%	b. 95%
c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL;	c. 100%	c. 100%	c. 100%	c. 100%	c. 100%	c. 100%	c. 100%
Persentase pelanggaran perda dan perkara yang ditangani;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

e. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Perubahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1. Tahapan 2. Rekomendasi	1. 2 Tahapan 2. 2 Rekomendasi	1. 2 Tahapan 2. 2 Rekomendasi	1. 2 Tahapan 2. 2 Rekomendasi	1. 2 Tahapan 2. 2 Rekomendasi	1. 2 Tahapan 2. 2 Rekomendasi	1. 2 Tahapan 2. 2 Rekomendasi	1. 2 Tahapan 2. 2 Rekomendasi
Persentase realisasi anggaran PD	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
a. Persentase BMD PD yang telah teregistrasi b. Persentase BMD PD yang telah tersertifikasi	a. % b. %	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%
Persentase alat dan bahan penunjang yang disediakan	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Jenis BMD yang diadakan	buah	65 buah	65 buah	65 buah	65 buah	65 buah	65 buah	65 buah
Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit
1. Jumlah permohonan IMB rumah tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400 m2 yang diterbitkan 2. Jumlah laporan hasil Money bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasayarakatan, pembangunan dan lingkungan hidup 3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	1. berkas 2. Laporan 3. laporan	1.75 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.75 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.75 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.80 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.85 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.90 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.100 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan
Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar	Berkas	75 Berkas	75 Berkas	75 Berkas	80 Berkas	85 Berkas	90 Berkas	100 Berkas

f. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Perubahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	1. dokumen 2. dokumen	1. 0 2. 0	1. 0 2. 0	1. 0 2. 0	1. 7 dokumen 2. 6 dokumen	1. 7 dokumen 2. 6 dokumen	1. 7 dokumen 2. 6 dokumen	1. 7 dokumen 2. 6 dokumen
Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	%	0	0	0	90 %	90 %	90 %	90 %
a. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi b. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	a. % b. %	a. 0 b. 0	a. 0 b. 0	a. 0 b. 0	a. 90% b. 0%	a. 90% b. 0%	a. 90% b. 0%	a. 90% b. 0%
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	0	0	0	89.1 Nilai	89.1 Nilai	89.1 Nilai	89.1 Nilai
Jumlah BMD yang diadakan	Jenis	0	0	0	108 Jenis	108 Jenis	108 Jenis	108 Jenis
Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	%	0	0	0	80%	80%	80%	80%
1. Jumlah permohonan IMB rumah tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400 m2 yang diterbitkan 2. Jumlah laporan hasil Money bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasayarakatan, pembangunan dan lingkungan hidup	1. berkas 2. Laporan 3 laporan	1.75 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.75 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.75 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.0 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.0 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.0 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan	1.0 berkas 2. 16 Laporan 3.4 laporan

3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun								
Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar	Berkas	75 Berkas	75 Berkas	75 Berkas	0 Berkas	0 Berkas	0 Berkas	0 Berkas

Dari hasil Rankir Perubahan Renstra tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Rankir Perubahan Renstra PD ini digunakan sebagai masukan dalam reuiu RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
2. Rankir Perubahan Rencana Strategis tahun 2021-2026 masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
3. Rankir Perubahan Rencana strategis tahun2021-2026 masih dapat digunakan/ relevan untuk digunakan cuan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Demikian kesimpulan hasil Rankir Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Kecamatan Gedangan di Tahun 2023 ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
SIDOARJO

Dr. HERI SOESANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680519 198803 1 002

Sidoarjo, 31 Mei 2023

CAMAT GEDANGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

INEKE DWI SETIAWATI, S. STP, MPA.
NIP. 197709241997012001

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Pembina Tingkat I

NIP. 197709204 199701 2 001

Dokumentasi Pembahasan Rankir Perubahan Renstra 2021-2026





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS
KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KANTOR KECAMATAN GEDANGAN
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkenannya Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedangan 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedangan 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan 2016-2021.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat hal tersebut, maka semua Pejabat Struktural dan staf Kecamatan Gedangan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**., maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rancangan Akhir Renstratermasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan



mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Gedangan periode 2021-2026.

Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sidoarjo, 31 Mei 2023
Kecamatan Gedangan
CAMAT GEDANGAN

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Pembina Tingkat I

NIP. 19770924 199701 2001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR BAGAN	8
IKHTISAR EKSEKUTIF	10
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Landasan Hukum.....	19
1.3 Maksud dan Tujuan.....	24
1.4 Sistematika Penulisan.....	26
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi	28
2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedangan.....	36
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangan.....	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	54
2.5 Keterhubungan Dan Kesesuaian Program Dan Kegiatan Dengan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Dalam Dokumen Rancangan Akhir Renstra-Pd.....	59
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN	
3.1 Identifikasi Permasalahn Berdasarkan Tugas & Fungsi PD.....	62
3.2 Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	66
3.3 Telaah Rancangan Akhir Renstra Kabupaten Sidoarjo.....	68
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	71
3.5 Penentuan Isu – Isu Srategis.....	72
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	76



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan	80
5.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Gedangan.....	82
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	85
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
BAB VIII PENUTUP.....	101

LAMPIRAN

1. Matriks Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2021-2026
2. Form E.73
3. Form E.80
4. SOP Mekanisme Reviu Rancangan Akhir Renstra 2021-2026
5. Matriks Penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 2.2.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	37
Tabel 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	37
Tabel 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
Tabel 2.5.	Sarana dan Prasarana	40
Tabel 2.6.	Matrik Pencapaian Kinerja	42
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan	51
Tabel 2.8.	Komparasi Capaian Sasaran Rancangan Akhir Renstraterhadap Sasaran Rancangan Akhir RenstraK/L.....	54
Tabel 2.9.	Matrik Tantangan dan Peluang	56
Tabel 2.10.	Telaah Rancangan Akhir Renstra RT RW.....	57
Tabel 2.11.	Kesesuaian Program dengan Tujuan dan Sasaran	60
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan	63
Tabel 3.2.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	64
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan.....	67
Tabel 3.4.	Kriteria Pembobotan	73
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangan....	78
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan.	82
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan	86
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	99



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.2.	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD.....	15
Bagan 2.1.	Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan	35

Kecamatan Gedangan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Arsitektur Kinerja Pembangunan	15
Gambar 1.3.	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di daerah..	17



IKHTISAR EKSEKUTIF

Melalui penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan ini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Gedangan. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Rancangan Akhir Renstra Kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Gedangan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Akhir Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Rancangan Akhir Renstra dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu pendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

a. Pengertian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Akhir Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Rancangan Akhir Renstra dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi Rancangan Akhir Renstra adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah. Rancangan Akhir Renstra memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Rancangan Akhir Renstra pada dasarnya merupakan penjabaran dari RJPMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis



sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (Renja). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Pemerintah Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Periode Tahun 2021–2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi Rancangan Akhir Renstraperiode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Melalui penyusunan Rancangan Akhir Renstraini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Gedangan. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Rancangan Akhir Renstra Organisasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kecamatan Gedangan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Mengingat hal tersebut, maka semua Pejabat Struktural dan staf Kecamatan Gedangan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Rancangan Akhir Renstra Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu **"Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan"**, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dengan demikian tujuan dan target Rancangan Akhir Renstra tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Sidoarjo di tahun berkenaan serta merupakan sasaran akhir (*the ultimate goals*) pada Renstra.



RPJMD memiliki keterkaitan sistemik dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah rumusan visi, misi dan program strategis dimanifestasikan ke dalam dokumen RPJMD, maka rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan target Program Pembangunan Daerah beserta kebutuhan pendanaannya. Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dimana RPJMD merupakan acuan penyusunan Rancangan Akhir RenstraPerangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target dalam Rancangan Akhir RenstraPerangkat Daerah, demikian pula target RKPD diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Rancangan Akhir RenstraPerangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.

Dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau perundang-undangan maka perlunya melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur



Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini maka ditetapkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga perlunya untuk dilakukan perubahan Rancangan Akhir RenstraPD.

b. Fungsi Rancangan Akhir RenstraPerangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong adanya proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok yakni:

- a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil

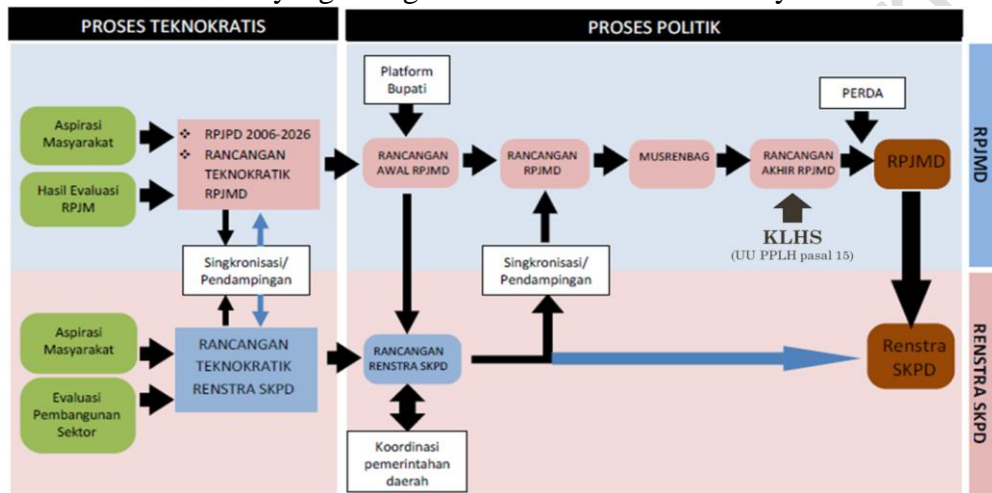
Dengan demikian fungsi Rancangan Akhir RenstraPerangkat Daerah adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaranpencapaian yang jelas dan terukur.

c. Proses Penyusunan Rancangan Akhir RenstraPerangkat Daerah

Berangkat pada amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan sebagai alat perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman pencapaian visi

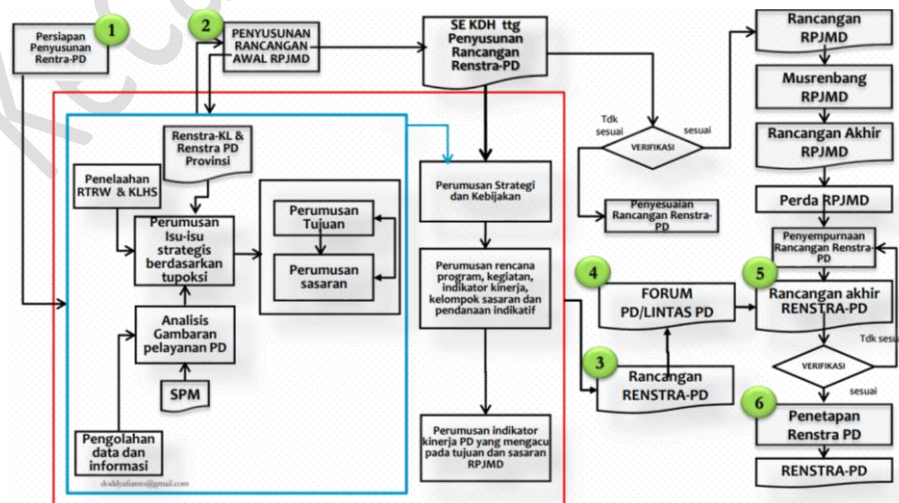


pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu pada proses teknokratis dan proses politis. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 yang merupakan proses penyusunan Rancangan Akhir Renstradilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat yaitu dalam konteks proses maupun konteks dari kedua dokumen tersebut yang saling keterkaitan satu sama lainnya.



Gambar 1. 1 Arsitektur Kinerja Pembangunan

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini.



Bagan 1. 2 alur Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD



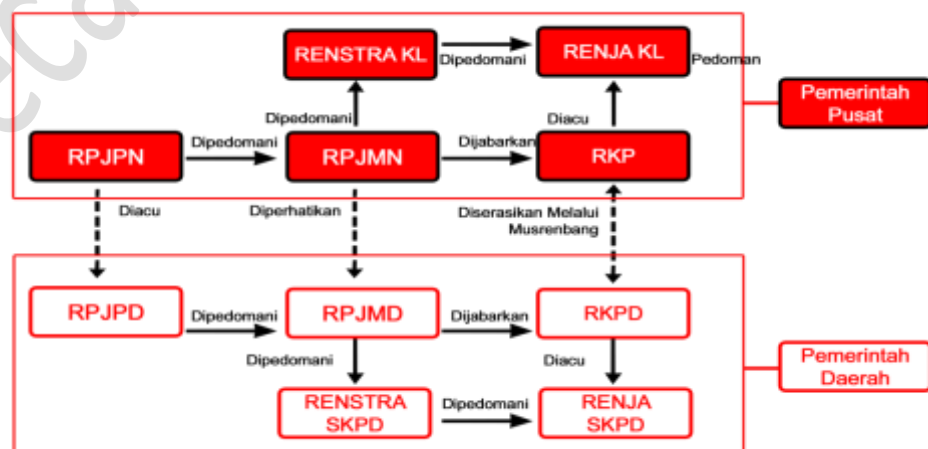
Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, isu-isu strategis Kecamatan Gedangan berdasarkan tupoksi, hasil penelaahan terhadap Rancangan Akhir RenstraK/L dan Rancangan Akhir RenstraProvinsi dimana Rancangan Akhir RenstraK/L dan Rancangan Akhir RenstraProvinsi yang ditelaah adalah Rancangan Akhir RenstraKementerian Dalam Negeri tahun 2019-2024 dan Rancangan Akhir RenstraProvinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

d. Keterkaitan Rancangan Akhir RenstraPerangkat Daerah dengan RPJMD, Rancangan Akhir RenstraKementerian/Lembaga (K/L), Rancangan Akhir RenstraKabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, padaPasal 272 ayat (1), yang berbunyi : "Perangkat Daerah menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.



Pasal 273 ayat (1) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat. Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo juga merupakan bagian dari unitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu maka Rancangan Akhir Renstraini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



Gambar 1. 3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah



Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo menurut gambar di atas dipedomani oleh RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Kesatuan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program dan akhirnya kinerja impact yang tergambar oleh adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks praktis maka Kecamatan Gedangan dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, artinya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategisnya berpedoman pada misi pertama RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.” dan misi kelima yaitu “Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga”.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan pula Perubahan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026.



1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Vii/Mpr/2001 Tentang Visi Dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Telah Diubah Lagi Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ”;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor : 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;



21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Pemandagri 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Pemandagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



31. Pemendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Pemendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019;
33. Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019;
34. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
40. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;



41. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
42. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
43. Peraturan bupati Sidoarjo No. 63 Tahun 2021 tentang Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
44. Peraturan bupati Sidoarjo No. 77 Tahun 2022 Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
45. Peraturan bupati Sidoarjo No. 80 Tahun 2022 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kondisi Kecamatan Gedangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang prima;
2. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gedangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Gedangan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai dengan Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan adalah untuk :



1. Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026;
2. Menjelaskan uraian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan Tahun 2026, dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Sidoarjo;

Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Camat Gedangan setiap akhir tahun anggaran dengan tolok ukur masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dan lampiran yang memuat Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Keterhubungan Dan Kesesuaian Program Dan Kegiatan Dengan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Dalam Dokumen Rancangan Akhir Renstra-Pd

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedangan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rancangan Akhir RenstraKementerian Dalam Negeri dan Rancangan Akhir RenstraProvinsi Jawa Timur
- 3.4 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangan
- 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gedangan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Kecamatan Gedangan



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidoarjo berbunyi sebagai berikut:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengenai masing-masing unsur di dalam struktur organisasi Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya. Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat berwenang menerbitkan dan menandatangani:

- a. IMB sesuai kewenangan;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara;



- c. Legalitas salinan dokumen kependudukan
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV dan AKV);
- e. Rekomendasi izin penutupan/ penggunaan jalan lokal/desa.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan kegiatan kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumahtangga perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangnya

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dibagi menjadi beberapa sub bagian yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam menerjemahkan rincian-rincian tugas kesekretariatan. Sub Bagian tersebut antara lain:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. Mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.



Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- 2) Melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- 3) Menerima Permohonan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan
- 4) Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat
- 5) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 6) Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan Teknis Kegiatan dibidang Pemerintahan;
 1. Pengesahan Pengantian antar waktu dan Pemberhentian karena
 2. Pengantian antar waktu anggota Badan Permusyawarah Desa
 3. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa



4. Pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawarah desa
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas bidang pemerintahan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugasnya

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban secara *ex officio* sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum antara lain ;
 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
 3. Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan /reklame liar)
 4. Penanganan Konflik sosial
- c. Memproses Permohonan Izin Gangguan usaha mikro
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban;
- e. Pelaksanaan Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan serta pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
- f. Pelaksanaan Tugas bidang lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya



5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian. Seksi Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang perekonomian;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang perekonomian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang perekonomian;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;
- e. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pedesaan;
- f. Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- g. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h. Pelaksanaan pengelolaan data profil desa dan kelurahan
- i. Penyelenggaraan penyuluhan penumbuhan wira usaha baru;
- j. Penciptaan hubungan kemitraan antara industri kecil, menengah dan besardengan lembaga ekonomi pedesaan;
- k. Penataan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL);
- l. Promosi produk industri dan dagang kecil dan mikro;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan rencana kerja di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM dan politik;
- f. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT);
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dalamPeningkatan Ekonomi Lokal(P3EL);
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan
- i. ProgramKecamatanRamah Anak (CaRa);
- j. Pengkoordinasian peningkatan keikutsertaan masyarakat ber-KB, termasuk kesetaraan dan keadilan gender partisipasi KB pria;
- k. Pelaksanaan pembinaan kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)
- l. Pengkoordinasian pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta pencegahan generasi muda dari ancaman HIV/AIDS;
- m. Pelaksanaan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangtugasnya.

7. Seksi Pembangunan Fisik

Seksi Pembangunan Fisik mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan fisik. Seksi Pembangunan Fisik dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Fisik yang berkedudukan di bawah dan



bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang pembangunan fisik;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan fisik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pembangunan fisik;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan fisik;
- e. Pemeliharaan rutin jalan lokal desa;
- f. Pemeliharaan dan pengawasan jalan lingkungan dan drainase mikro diwilayah pennukiman;
- g. Melaksanakan gerakan penanaman pohon lindung di ruang milik jalandesesa;
- h. Pembinaan dan pengelolaan sampah sampai ke transfer depo (TPS);
- i. Inventarisasi data aset milik pemerintahan daerah;
- j. Pemeliharaan saluran tersier;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangtugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

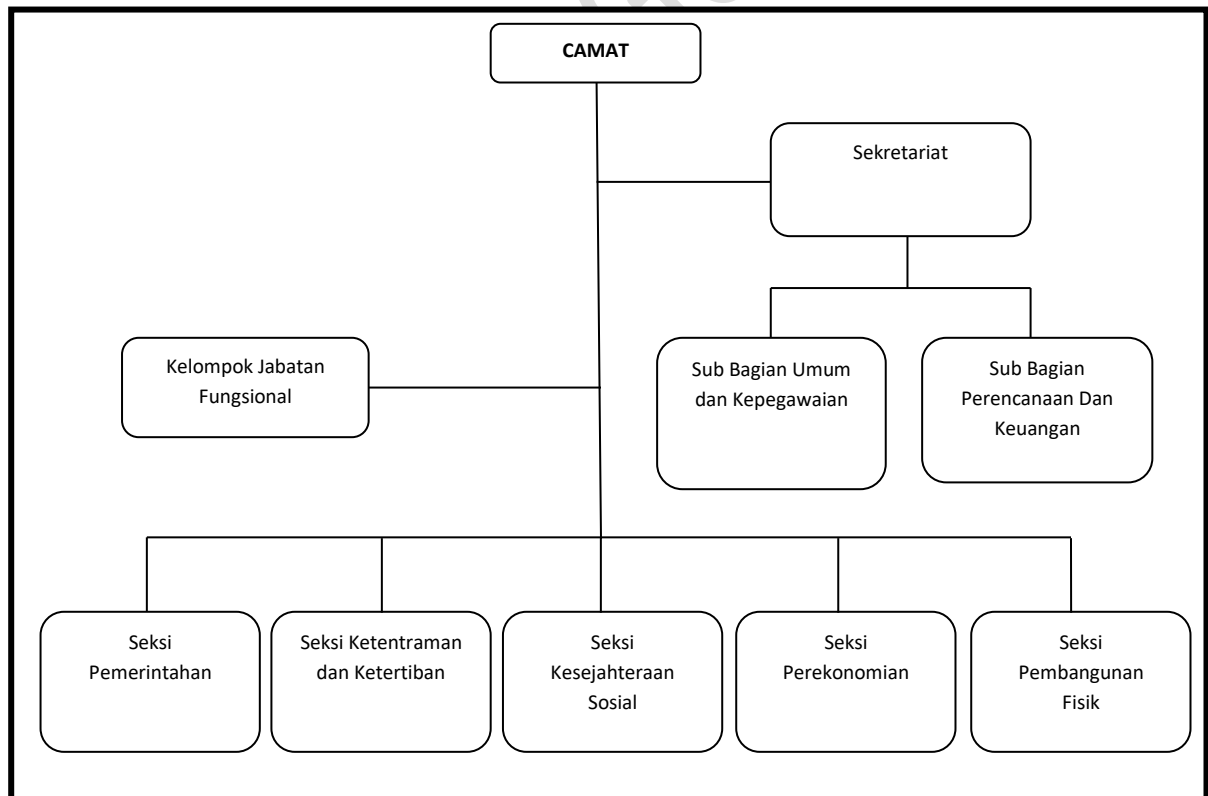
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan Gedangan terdiri dari :



- a. Unsur Pimpinan : Camat
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Camat
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi terdiri dari :
 - Seksi Pemerintahan
 - Seksi Ketertaman dan Ketertiban
 - Seksi Pembangunan Fisik
 - Seksi Kesejahteraan Sosial
 - Seksi Perekonomian
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan





2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN GEDANGAN

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sumber Daya Perangkat Daerah adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi dan sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya serta aset dan potensi yang berfungsi sebagai modal dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata fisik dan non fisik dalam merealisasikan tujuan organisasi. Susunan kepegawaian di Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	GOLONGAN								HONORER			JUMLAH
		IV		III		II		I		L	P	Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P				
1	CAMAT		1										1
2	SEKRETARIAT	1		1	3	1	1			4	4	8	15
3	SEKSI PEMERINTAHAN			1		1				1		1	3
4	SEKSI PEMBANGUNAN FISIK				1	2				4		4	7
5	SEKSI KESOS				2						1	1	3
6	SEKSI TRANTIB			1		5				5		5	11
7	SEKSI PEREKONOMIAN			1	1							0	2
	JUMLAH	1	1	4	7	9	1	0	0	14	5	19	42



Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Gedangan sebanyak 42 orang dengan rincian:

1. Pegawai Berdasarkan Jabatan:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	PEJABAT STRUKTURAL	4	4	8
2	STAF /ASN	10	4	14
3	TENAGA TEKNIS / FUNGSIONAL		1	1
4	PENGAMANAN KANTOR / NON ASN	3		3
5	KEBERSIHAN DLHK / NON ASN	4		4
6	HONORER / NON ASN	7	5	12
	JUMLAH	28	14	42

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jabatan didukung oleh 42 orang dengan rincian 8 orang sebagai pejabat struktural, 14 orang sebagai staf, 1 orang sebagai tenaga teknis/fungsional, 3 orang sebagai pengaman kantor, 4 orang sebagai petugas kebersihan DLHK / Non ASN dan 12 orang sebagai tenaga honorer/Non ASN orang sebagai tenaga honorer.

2. Pegawai Berdasarkan Golongan:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	1	1	2



2	GOLONGAN III	4	7	11
3	GOLONGAN II	9	1	10
4	GOLONGAN I			0
5	HONORER	14	5	19
JUMLAH		28	14	42

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan golongan didukung oleh 42 orang dengan rincian 2 orang termasuk Golongan IV, 11 orang termasuk Golongan III, 10 orang termasuk Golongan II dan 19 orang termasuk honorer. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua golongan yang mendominasi dalam Sumber Daya Manusia Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yaitu Golongan III dan golongan II masing-masing sejumlah 11 orang dan 10 orang.

3. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	PASCA SARJANA	2	2	4
2	SARJANA	3	2	5
3	DIPLOMA	1	3	4
4	SLTA	22	6	28
5	SLTP	1		1
6	SD			
JUMLAH		29	13	42



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pendidikan didukung oleh 42 orang dengan rincian 4 orang lulusan Pasca Sarjana, 5 orang lulusan Sarjana, 4 orang lulusan Diploma, 28 orang lulusan SLTA dan 1 orang lulusan SLTP. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo di dominasi oleh lulusan SLTA sejumlah 28 orang. Dengan mengacu pada kondisi dan daya dukung SDM tersebut diatas, Kecamatan Gedangan dapat secara maksimal memberikan pelayanan secara efektif dengan terus meningkatkan pola-pola update dan upgrade kemampuan kompetensi seiring dengan perkembangan era digitalisasi pelayanan yang akan mempermudah masyarakat pada umumnya. Kebutuhan akan peningkatan kompetensi berbasis IT / Digital telah direncanakan dalam program pengembangan SDM Kecamatan Gedangan seiring perkembangan teknologi dan Informasi.

Kondisi sarana prasarana yang ada di Kecamatan Gedangan sudah cukup memadai untuk mendukung operasional pelayanan dan menunjang tujuan kecamatan Gedangandalam memberikan pelayanan prima kepada warga. Proses peningkatan dan upgrade Infrastruktur terutama pelayanan berbasis Digital masih perlu dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada perencanaan anggaran setiap tahun. Diharapkan dengan kondisi yang ada dan perencanaan pengembangan infrastruktur dan layanan berbasis digital dapat memberikan peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.



Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN JENIS BARANG	SATUAN	KETERANGAN
1.	Mobil Station Wagon	4 unit	Baik
2.	Kendaraan roda 2	13 unit	Baik
3.	Lemari/Rak	28 unit	Baik
4.	Filling cabinet / brankas	16 unit	Baik
5.	CCTV	1Paket	Baik
6.	Alat Penghancur Kertas	1 buah	Baik
7.	Mesin Absensi	2 buah	Baik
8.	LCD Proyektor dan monitor	6 buah	Baik
9.	Mesin antrian	1 buah	Baik
10.	Papan Instansi dan pegumuman	11 buah	Baik
11.	Printer	24 buah	Baik
12.	Scanner	3 buah	Baik
13.	Meja Kerja	31 buah	Baik
14.	Kursi/bangku/sofa	100 buah	Baik
15.	AC/Kipas Angin	38 buah	Baik
16.	Televisi	4 buah	Baik
17.	Alat Pemadam/Portable	3 buah	Baik
18.	Personal komputer	15 buah	Baik
19.	laptop	14 set	Baik



2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Gedangan dilakukan oleh petugas atau aparatur kecamatan sesuai dengan Standar Pelayanan yaitu dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai pemohon. Dalam mengukur kinerja, pada tahun 2020 Kecamatan memiliki 10 sasaran, yaitu:

1. Prosentase Penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sesuai Standar Pelayanan
2. Prosentase Penerbitan KK (Kartu Keluarga) yang sesuai Standar Pelayanan
3. Prosentase Penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan
4. Prosentase Penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan
5. Prosentase Penerbitan IMB rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 400 m² yang sesuai Standar Pelayanan
6. Prosentase Penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan
7. Prosentase jumlah koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditindaklanjuti
8. Prosentase desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu
9. Prosentase desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu
10. Prosentase desa yang melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu.

Berdasarkan sasaran kinerja di atas, Kecamatan Gedangan mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Gedangan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020. Berikut adalah tabel tentang hasil analisis pencapaian kinerja layanan Kecamatan Gedangan dan tabel hasil analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Gedangan tahun 2016-2020:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Tabel 2.6
Matrik Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Gedangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD***)	Target Rancangan Akhir RenstraSKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	102	101	100
2	Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan	82	86	88	89	90	80	84	88	90	90	97	98	100	101	100
3	Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan	80	85	86	89	90	80	84	88	90	90	100	98	102	101	100
4	Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	102	101	100
5	Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	102	101	100



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

	non perum di bawah 20 m ² yang sesuai Standar Pelayanan															
6	Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	101	101	102
7	Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti	1296	1296	1330	1330	1330	1296	1296	1330	1340	1340	100	100	101	101	101
8	Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu	100	100	100	100	100	93	100	100	100	100	93	100	100	100	100
10	Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Berdasarkan Reviu pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun 2016 hingga 2020 dapat diketahui bahwa kinerja Kecamatan Gedangan sudah memenuhi target dimana realisasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Pada rasio kinerja dapat kita ketahui bahwa kinerja Kecamatan Gedangan sudah baik dan stabil setiap tahunnya. Bila dilihat setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penerbitan KTP Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

2. Persentase Penerbitan KK Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Persentase Penerbitan Surat Keterangan Waris Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

4. Persentase Penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam persentase penerbitan surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan sudah



memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

5. Persentase Penerbitan Imb (Izin Mendirikan Bangunan) Rumah Tinggal Non Tingkat Non Perum Dibawah 200 M² Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 400 m² yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumahtinggal non tingkat non perum dibawah 20 m² yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengendalian pelayanan yang efektif.

6. Persentase Penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Penerbitan legalitas dokumen ini menjadi sangat krusial dikarenakan saat pandemic / kondisi ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan bantuan social dengan syarat kelengkapan dokumen. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

7. Presentase Koordinasi Dan Fasilitasi Di Bidang Pembangunan Dan Pemerintahan Yang Ditidaklanjuti

Pada Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.



8. Persentase Desa Yang Sudah Menyusun APBDes Tepat Waktu

Pada Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

9. Persentase Desa Yang Sudah Menyusun LPPD Tepat Waktu

Pada Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

10. Persentase Desa Yang Sudah Melaksanakan Musrenbang Desa Tepat Waktu

Pada Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

11. Persentase Penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha) sesuai dengan Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan SIUP/TDP pada Wilayah Kecamatan Gedangan sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan SIUP/TDP yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan yang dapat mendukung kegiatan pemerintah daerah dalam mensupport performance UKM dalam menghadapi pandemic Covid-19. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 kinerja pelayanan yang sedikit menurun dikarenakan perubahan kebijakan



mengacu pada pengendalian protocol kesehatan (Prokes) dan meminimalkan tatap muka dalam pelayanan.

Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

1. Penerbitan KTP , KK , Surat Pindah, Surat Keterangan Waris, Surat Perubahan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Pencari Kerja, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 200 M2 dan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang belum sesuai Standar Pelayanan;
2. Kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
3. Kurangnya komitmen Aparatur Sipil Negara dalam mematuhi Standar Pelayanan;
4. Standar Pelayanan masih belum diimplementasikan secara optimal,
5. Adanya kekurangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya Aparatur Sipil Negara yang pensiun dan mutasi;
6. Kurangnya koordinasi internal;
7. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat beberapa aktifitas pelayanan menjadi terhambat;
9. Pelayanan yang dilakukan secara online sering mengalami kendala;
10. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan IT dalam penyelesaian permasalahan pelayanan secara online;
11. Kurangnya informasi dan kemampuan masyarakat dalam penggunaan pelayanan secara online;



12. Masih adanya Desa yang belum masuk dalam kategori desa maju.

Upaya yang telah dilakukan :

1. Meningkatkan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Standar Pelayanan;
2. Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan dalam bidang Kependudukan kepada Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa;
3. Meningkatkan komitmen Aparatur Sipil Negara dalam mematuhi Standar Pelayanan;
4. Mengoptimalkan kepatuhan Standar Pelayanan;
5. Menambah tenaga Aparatur Sipil Negara yang menangani Pelayanan;
6. Meningkatkan koordinasi internal;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian kendala jaringan online;
9. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga IT di ruang pelayanan;
10. Meningkatkan Pelayanan Prima di Kantor Kecamatan Gedangan dan meningkatkan sosialisasi dalam pelayanan kepada masyarakat;
11. Meningkatkan koordinasi dengan penuh tanggungjawab untuk mendorong terbentuknya desa-desa maju di wilayah Kecamatan Gedangan.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan



sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah / Perangkat Daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Gedangan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari Renja SKPD terbit DPA Perangkat Daerah yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama period tahun 2016 hingga tahun 2021. Keuangan Kecamatan Gedangan merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Gedangan. Selanjutnya belanja Kecamatan Gedangan sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004



tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Adapun perkembangan anggaran dan realisasi Kecamatan Gedangan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo

Uraian Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Kesekretariatan																	
Penyediaan barang/jasa perkantoran	0	0	566.880,000	581.889.290,000	642.493.238	0	0	566.880,000	518.971.922,000	560.661.939,000	99,00	100,00	100,00	89,19	87,26	10%	95%
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	0	0	98.220,000,000	101.950.000,000	127.361.303,000	0	0	98.220,000,000	101.247.168,000	97.620.000,000	99,00	98,80	100,00	99,31	76,65	8%	85%
Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	0	0	1.901,000,000	2.067.950,000	2.825,000,000	0	0	1.889,000,000	2.067.950,000	1.615,400,000	98,80	100,00	95,00	100,00	57,18	8,5%	80,5%
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	0	0	267.350,000,000	275.784.442,500	503.076.600,000	0	0	223.980,000,000	267.276.906,000	481.431.603,000	100,00	98,80	100,00	96,92	95,70	10%	98%
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	0	0	275.450,000,000	289.758.000,000	300.906.000,000	0	0	275.450,000,000	288.321.555,000	279.404.975,000	100,00	100,00	100,00	99,50	92,85	10%	98%
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	0	0	25.340,000,000	35.870,000,000	2.673,600,000	0	0	20.450,000,000	28.507,510,000	1.409,000,000	87,50	85,55	89,19	79,47	52,70	10%	65%
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	0	0	2.455,000,000	2.670,000,000	3.729,600,000	0	0	2.220,000,000	2.670,000,000	791,200,000	88,75	88,00	89,50	100,00	21,21	10%	56%
Penyusunan laporan keuangan	0	0	2.000,000,000	5.000,000,000	2.970,000,000	0	0	2.678,000,000	4.750,000,000	582,000,000	88,00	89,50	93,55	95,00	19,60	10%	45%
Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan																	
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	0	0	4.230,000,000	3.750,000,000	5.190,000,000	0	0	4.230,000,000	3.750,000,000	5.190,000,000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	8%	100%
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	0	0	18.350,000,000	27.213,000,000	2.325,000,000	0	0	18.350,000,000	27.150,000,000	2.075,000,000	-	100,00	100,00	99,77	89,25	12%	95%
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	1.500,000,000	3.000,000,000	2.550,000,000	0	0	1.500,000,000	3.000,000,000	2.550,000,000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25%	100%
Koordinasi dan Kerjasama dengan	0	0	4.905,000,000	937,500,000	15.225,000,000	0	0	4.905,000,000	937,500,000	14.925,000,000	100,00	100,00	100,00	100,00	98,03	10%	99%



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pembangunan dan Lingkungan																	
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan	0	0	250,000.00	15,000,000.00	3,150,000.00	0	0	250,000.00	15,000,000.00	3,075,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.62	10%	95%
Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Perekonomian	0	0	250,000.00	3,000,000.00	2,700,000.00	0	0	250,000.00	3,000,000.00	2,550,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.44	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Masyarakat	0	0	250,000.00	260,000.00	255,000.00	0	0	250,000.00	260,000.00	240,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.12	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	250,000.00	260,000.00	255,000.00	0	0	250,000.00	260,000.00	240,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.12	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	0	0	250,000.00	260,000.00	255,000.00	0	0	250,000.00	260,000.00	240,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.12	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan	0	0	6,050,000.00	8,500,000.00	255,000.00	0	0	6,050,000.00	8,456,690.00	240,000.00	99.05	99.00	95.00	99.49	94.12	10%	98%
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian	0	0	344,250,000	434,100.00	434,100.00	0	0	344,250,000	434,100.00	419,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.54	10%	98%
Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	0	0	50,000,000.00	88,111,780.00	8,793,224.00	0	0	50,000,000.00	88,019,380.00	5,927,000.00	100.00	100.00	100.00	99.90	67.40	10%	98%
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan IMB Usaha Mikro dan IMB Rumah Tinggal	0	0	11,110,000.00	24,464,400.00	5,295,000.00	0	0	11,110,000.00	24,443,400.00	5,295,000.00	100.00	100.00	100.00	99.91	100.00	10%	98%
Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan SIUP, TDP Usaha Mikro	0	0	2,225,000.00	2,622,000.00	2,780,000.00	0	0	2,225,000.00	2,622,000.00	2,580,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.81	10%	98%
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perbup, Pengawasan dan Penertiban Usaha, Penanganan Konflik Sosial	0	0	252,540,000.00	307,062,500.00	267,704,000.00	0	0	252,540,000.00	294,375,775.00	263,366,480.00	99.05	99.00	95.00	99.49	94.12	10%	98%
Pembinaan Lembaga, Kegiatan	0	0	4,234,500.00	8,196,000.00	149,955,200.00	0	0	4,234,500.00	8,175,000.00	147,361,184.00	95.00	99.49	94.12	95.87	98.27	10%	98%



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Lingkungan Hidup dan Penanganan Sampah Domestik																	
Pembinaan Perangkat Desa	0	0	8,678,900.00	12,067,000.00	20,620,000.00	0	0	8,678,900.00	12,025,000.00	19,595,000.00	99.74	95.03	99.74	99.74	95.03	10%	98%
Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima	0	0	45,098,000.00	88,267,500.00	27,625,000.00	0	0	45,098,000.00	84,812,500.00	25,975,000.00	99.74	95.03	99.74	99.65	94.03	10%	98%
Pembinaan Lembaga dan Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	0	0	3,123,000.00	3,750,000.00	111,154,900.00	0	0	3,000,050.00	3,750,000.00	87,460,715.00	95.00	99.49	95.00	96.09	78.68	10%	98%
Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum																	
Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum	0	0	97,185,000.00	41,075,300.00	41,075,300.00	0	0	92,137,250.00	41,075,300.00	38,804,000.00	95.03	99.74	94.83	100.00	94.47	15%	95%
Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum	0	0	34,945,000.00	0.00	0.00	0	0	31,292,250.00	0.00	0.00			89.55		-		



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1. Hasil Analisis terhadap Dokumen Rancangan Akhir Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Perumusan tantangan dan peluang yang pertama berdasarkan telaah terhadap sasaran dalam Rancangan Akhir Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sasaran Rancangan Akhir Renstrakementerian yang sinergi dengan capaian indikator kinerja Kecamatan Gedangan periode sebelumnya ditunjukkan pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2. 8 Komparasi Capaian Sasaran Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terhadap Sasaran Rancangan Akhir RenstraK/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran pada Rancangan Akhir Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Sasaran pada Rancangan Akhir Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	88,48	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Berkembangnya status pembangunan desa
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Gedangan Dilaksanakan Dengan Baik	100	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan	
	Persentase Desa Maju di Kecamatan Gedangan	53,33		

Implikasi sasaran Rancangan Akhir Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Rancangan Akhir Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 terhadap pelayanan Kecamatan Gedangan antara lain:

a) Tantangan:



1. Adanya persepsi negative desa terhadap indeks desa membangun. Perangkat desa memilih untuk tidak menaikkan status menjadi desa mandiri untuk menghindari berkurang ADD
 2. Masih terdapat warga Masih terdapat warga yang tinggal di Kabupaten Sidoarjo namun belum mengurus surat keterangan pindah domisili (SKPWNI).
 3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen dan kevalidan data kependudukan masih rendah.
- b) Peluang:
1. Perkembangan teknologi informasi yang dapat menunjang kinerja pelayanan maupun administratif
 2. Kepedulian desa akan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan telah cukup baik
 3. Telah terbangunnya database kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

2.4.2 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun ketiga. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang tercakup dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.

Berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini serta memperhatikan hasil pencapaian pelayanan, analisa RTRW Kecamatan Gedangan dan KLHS Kecamatan Gedangan, maka tantangan dan peluang Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.9 Matrik Tantangan dan Peluang

Tantangan	<ol style="list-style-type: none">1. Tuntutan terselenggaranya koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan2. Tuntutan perkembangan pembangunan yang harus berwawasan lingkungan hidup3. Belum terib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat desa4. Belum disiplinnya pelaksanaan penyusunan APBDes, LPPD, dan MusrenbangDes5. Pemahaman aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan dokumen dan proses pembangunan desa yang masih kurang
Peluang	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya otonomi daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya2. Adanya perwujudan e-government3. Diwujudkan pelayanannya yang mudah dalam aplikasi Online4. Peningkatan Kompetensi SDM Kecamatan seiring dengan tuntutan media informasi pelayanan5. Perbaikan Sistem Informasi Manajemen terkait Standar Pelayanan secara Dokumentasi Online / Offline

Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Gedangan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Dari Renja Perangkat Daerah terbit DPA Perangkat Daerah yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama period tahun 2016 hingga tahun 2021. Keuangan Kecamatan Gedangan merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perludilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Gedangan. Selanjutnya belanja Kecamatan Gedangan sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Tabel 2.10. Telaah Rancangan Akhir RenstraRTRW

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah
1	SSWP I meliputi wilayah Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sedati, dengan fungsi utama Permukiman, Industri dan Perdagangan skala lokal, regional, dan internasional dengan pusat pertumbuhan berada di	Zona industri Kecamatan Gedangan seluas 534,36 Ha	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan	1. Perijinan pembangunan industri 2. Perijinan pembangunan rumah pada kawasan pemukiman pedesaan 3. Perijinan pembangunan rumah pada kawasan



	Kawasan Waru;		ketentraman	permukiman pedesaan
2	Sistem Perkotaan: Hirarki perkotaan sedang dengan fungsi sebagai pemasok 2 kebutuhan dan lokasi pengolahan agroindustri dan berbagai kegiatan agrobisnis	Kawasan permukiman perdesaan Kecamatan Gedangan, seluas 12,77 Ha	ketertiban umum	4. Koordinasi dalam pengembangan wilayah kecamatan 5. Adanya Pengawasan pemanfaatan lahan dan alih fungsilahan
3	Kawasan yang mempunyai prospek pengembangan tinggi dan mendapatkan prioritas pelayanan air bersih	Kawasan permukiman perkotaan Kecamatan Gedangan, seluas 1.511,72 Ha		
4	Kawasan militer berada pada sebagian Kecamatan Waru, Gedangan, Buduran, dan Sedati. Kawasan militer tidak diijinkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan lain			

2.4.3 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW

Pada Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sidoarjo, pada Kecamatan Gedangan terdapat beberapa isu pembangunan berkelanjutan yang terdapat di Kecamatan Gedangan, antara lain:

1. Wilayah kumuh akibat kepadatan dan pertumbuhan penduduk
2. Alih fungsi lahan sawah dan tambak menjadi permukiman serta industri sehingga dapat menambah aspek kendali lingkungan yang lebih kompleks
3. Kemacetan lalu lintas akibat jumlah kendaraan yang meningkat tanpa pelebaran jalan



2.5. KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DALAM DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RENSTRA-PD

Dinamika situasi dalam kehidupan bermasyarakat harus selalu direspon dengan baik oleh perangkat daerah, oleh karena itu perubahan Rancangan Akhir Renstra merupakan hal yang seyogyanya dilaksanakan pada saat diperlukan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Tabel 2.11. Kesesuaian Program dengan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber data
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai SKM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan trantibum yang difasilitasi	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan}}{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang difasilitasi}} * 100\%$	Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Laporan Masyarakat
2.			Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat 	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30 	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	LHE SAKIP
					Nilai RB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Mengisi LKE dari inspektorat. 	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE RB
					Nilai IPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 	Indeks penilaian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. 0 – 1,00 F Gagal 	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE IPP



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber data
						Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik	b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima		



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Keberadaan Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 UU No. 32 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo maka tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Gedangan berfokus pada urusan pemerintahan yaitu pelayanan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedangan melakukan Evaluasi dan analisis kinerja. Setelah Kecamatan Gedangan melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2021 - 2026.

Identifikasi permasalahan di Kantor Kecamatan Gedangan dilakukan terhadap beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan yang terfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Gedangan serta dikolaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Kecamatan Gedangan. Permasalahan pelayanan adalah perbedaan / kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja Kecamatan Gedangan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo seperti halnya instansi lainnya



juga memiliki permasalahan-permasalahan yang diharapkan ataupun tidak tetap harus dihadapi. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

No	Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan	100	1. Kualitas dan 2. Kuantitas Sumber daya aparatur 3. Sarana dan prasarana 4. SOP pelayanan 5. Perencanaan dan pelaporan kinerja kecamatan 6. Sinergitas antar bidang 7. Administrasi perkantoran	1. Pemahaman masyarakat tentang syarat pelayanan umum 2. Administratif tingkat desa 3. Kedisiplinan penyusunan dokumen desa 4. Kualitas sumberdaya aparatur desa	1. Kurangnya jumlah SDM ruang pelayanan yang memiliki jiwa pelayanan prima 2. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan 3. Ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan dalam pelayanan umum 5. Perencanaan dan pelaporan kinerja kecamatan masih belum optimal 6. Belum sinerginya hubungan antar pengelola keuangan daerah 7. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat kecamatan 8. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat Desa 9. Belum disiplinnya pelaksanaan penyusunan APBDes, LPPD, dan MusrenbangDes 10. Pemahaman aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan dokumen dan proses pembangunan desa yang masih kurang
2	Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan	100			
3	Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan	100			
4	Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan	100			
5	Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 20 m ² yang sesuai Standar Pelayanan	100			
6	Persentase penerbitan SIUP/TDP pada Wilayah Kecamatan Gedangan yang sesuai Standar Pelayanan	100			
7	Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan	100			
8	Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti	12330			
9	Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu	100			



Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Program Kecamatan Gedangan disusun melalui Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang dijabarkan melalui Rancangan Akhir Renstra Organisasi Pemerintah Daerah Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan Organisasi Pemerintah Daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam realisasi penerapan program di Kecamatan Gedangan diidentifikasi dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kompetensi dan Jumlah SDM	Kurangnya jumlah SDM ruang pelayanan yang memiliki jiwa pelayanan prima	1. Kebijakan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang kompleks 2. Belum optimalnya pemanfaatan data dan sistem informasi serta belum dipahami dan dilaksanakannya penyusunan kebutuhan SDM secara tepat.
		Belum tertib dan	1. Belum optimalnya sarana dan



		lemahnya administrasi perkantoran tingkat kecamatan	prasarana di Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan di Kecamatan sesuai kewenangan yang sudah dilimpahkan 2. Masih rendahnya inovasi yang dibuat oleh Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring terkait ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana. 4. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan 5. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana Kelurahan.
		Belum optimalnya penerapan standar pelayanan	
2.	Hubungan antar lembaga	Belum tertib dan lemahnya pemahaman administrasi perkantoran tingkat Desa	6. Masih rendahnya pemahaman pwerangkat Desa mengenai akuntabilitas laporan dan administrasi Desa 7. Belum maksimalnya sosialisasi informasi pelayanan di era Digital kepada Masyarakat 8. Belum optimalnya penggunaan perangkat dan infrastruktur di Desa dalam penyajian informasi & pelayanan kepada Masyarakat
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan dalam pelayanan umum	

Dari identifikasi dan pemetaan permasalahan tersebut di atas, Kecamatan Gedangan membuat Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renja sesuai dengan aspek permasalahan dan telaah akar masalah. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan. Dari Renja Organisasi Pemerintah Daerah terbit DPA Organisasi Pemerintah Daerah yang saling berkaitan satu sama lainnya.



3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan tahun 2016-2021, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2021-2026. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**.

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalkan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi di *breakdown* ke dalam tiap misi.

Guna mewujudkan visi Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan diantaranya adalah Kecamatan Gedangan. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 memberikan pedoman bagi Kecamatan Gedangan dalam menyusun Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan. Berdasarkan visi misi dan isu strategis yang ada maka ditetapkan Tujuan dari masing-masing misi yang diukur dengan indikator. Kelima misi tersebut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;



2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;
 3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan;
 4. Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya;
 5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga
- Dari 5 (lima) misi RPJMD, ada 2 misi yang harus di jadikan acuan oleh kecamatan Gedangan yaitu Misi ke-1 dan Misi ke-5. Ini menjadi pendorong untuk Kecamatan Gedangan untuk pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Visi :			
<i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</i>			
Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha 2. Mewujudkan Masyarakat Religius Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan yang belum sesuai Standar Pelayanan; - Kurangnya pemahaman mengenai Standar Pelayanan; - Kurangnya komitmen dalam mematuhi Standar Pelayanan; - Standar Pelayanan masih belum diimplementasikan secara optimal; - Adanya kekurangan Sumber Daya Manusia; - Kurangnya sarana dan prasarana; - Adanya pandemi Covid-19 membuat aktifitas pelayanan terhambat; - Pelayanan secara online sering mengalami kendala; - Kurangnya kemampuan IT pelayanan secara online; - Kurangnya informasi masyarakat dalam pelayanan online. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya keahlian SDM yang menguasai sarpras yang ada; 2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarpras yang memadai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Peraturan Bupati tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan; 2. Tersedianya dukungan APBD.
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih lemahnya inventarisir informasi terdokumentasi terkait permasalahan ketertiban umum di wilayah kecamatan - Kurangnya keterbukaan informasi yang didapat oleh Perangkat Daerah terutama permasalahan ketertiban umum secara 	Masih kurangnya kesadaran mengenai pentingnya keterbukaan informasi penghambat ketertiban umum	1. Adanya dukungan pemerintah pusat mengenai pengukuran dan pencapaian tujuan pelayanan ketertiban



	tepat dan cepat		umum 2. Adanya dukungan kekeluargaan antar instansi pemerintah dan stakeholder yang sangat baik.
--	-----------------	--	---

Pada Misi satu, dijabarkan ke dalam faktor penghambat dan faktor pendorong. Fokus pada misi ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yang menjadi prasyarat dasar bagi percepatan pembangunan di kabupaten Sidoarjo. Penjabaran faktor penghambat dan faktor pendorong pada Misi tersebut secara substansial memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di level pemerintah daerah maupun Kecamatan Gedangan.

Kecamatan Gedangan memiliki beberapa penghambat / permasalahan untuk bisa mencapai Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD. Disamping itu, Kecamatan Gedangan juga memiliki faktor pendorong untuk mengatasi penghambat / permasalahan yang di hadapi. Dengan adanya faktor pendorong yang mampu mengatasi faktor penghambat maka diharapkan Kecamatan Gedangan mampu untuk mewujudkan misi tersebut.

3.3 TELAAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA KABUPATEN SIDOARJO

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni “*Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani*” . Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita



tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tahapan-tahapan program dan kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan selama periode tersebut. Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo menyusun RPJMD, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan RPJMD, musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan RPJMD sebagai sebuah Peraturan Daerah. Proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo perlu dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan yang lebih terinci untuk memudahkan pelaksanaannya. Setiap tahunnya RPJMD perlu dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tiap tahunnya.

RKPD memuat rencana program dan kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja pembangunan tiap tahun untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Selain itu RPJMD dijabarkan ke dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan periode 2021-2026 di urusan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan tiap urusan



di setiap tahunnya, dibuat dokumen rencana kerja (Renja) Organisasi Pemerintah Daerah yang mengacu pada program dan kegiatan di Rancangan Akhir Renstra Organisasi Pemerintah Daerah dan menjabarkan Organisasi Pemerintah Daerah di tahun yang bersesuaian.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan benang merah dari Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat / terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arahan ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).



d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Program Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD merupakan instrumen penting dan strategis dalam mewujudkan target pembangunan daerah. Program pembangunan tersebut merupakan acuan bagi seluruh Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun serangkaian kegiatan yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun kedua. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedua yang tercakup dalam RPJMD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam arahan sistim perkotaan Jawa Timur,



Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa rencana tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:

- a. Pengembangan Kasawan Agropolitas di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang dan Bangkalan;
- b. Pengembangan kawasan industri dan perdagangan di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Gedangan yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS yaitu menunjukkan bahwa Kecamatan Gedangan merupakan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo dalam hierarki atau besaran perkotaan termasuk perkotaan sedang. Secara perwilayahan Kecamatan Gedangan termasuk ke dalam SSWP 1 yaitu dengan pusat di Kawasan Waru dan fungsi utama permukiman, industri dan perdagangan, dikembangkan fasilitas transportasi, mall, bandar udara dan fasilitas pendukung lainnya untuk skala lokal, regional, dan internasional. Kecamatan Gedangan masuk pada rencana pengembangan wilayah prioritas yang menadapatkan pelayanan air bersih dan sekaligus sebagai jaringan distribusi air bersih serta sebagai ruang untuk utilitas (air bersih). Kondisi saat ini Kecamatan Gedangan memiliki zona industri seluas 534,36 Ha dan kawasan permukiman seluas 12,77 Ha serta kawasan permukiman perkotaan seluas 1,511,72 Ha. Kecamatan Gedangan termasuk juga kawasan Militer yang terdiri dari Kawasan Tangsi Militer, Kawasan Latihan Militer, dan Kawasan Penyimpanan Mesiu/Amunisi.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.



Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Dibahas melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan seluruh jajaran Kecamatan Gedangan, Akademisi, dan stake holder terkait.
- b. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel.
 - 2) Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut.

Tabel 3.4
Kriteria Pembobotan

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta

Berdasarkan pada penelaahan identifikasi masalah, visi misi kepala daerah dan RTRW, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Kecamatan Gedangan antara lain:

- a. Kekuatan
 1. Adanya pendanaan yang konsisten dari Pemerintah Kabupaten



Sidoarjo

2. Keberadaan kecamatan semakin kuat seiring dengan diterbitkannya regulasi baru Perbup Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 mengenai tupoksi kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
3. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati ke Kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

b. Kelemahan

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal
2. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan
3. Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam administrasi barang
4. Ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal
5. Perencanaan & Pelaporan kinerja kecamatan masih belum optimal
6. Belum sinerginya hubungan antar pengelola keuangan daerah
7. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat kecamatan
8. Kualitas perfoma nilai SKM Kecamatan
9. Berapa Desa menuju Mandiri
10. Proses penyusunan dokumen perencanaan, laporan, penyusunan APBDes

c. Peluang

1. Adanya otonomi daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya
2. Adanya pewujudan *e-government*

d. Ancaman

1. Tuntutan terselenggaranya koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan
2. Tuntutan perkembangan pembangunan yang harus berwawasan lingkungan hidup
3. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat Desa
4. Belum disiplinnya pelaksanaan penyusunan APBDes, LPPD dan MusrenbangDes
5. Pemahaman aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan



- dokumen dan proses pembangunan desa yang masih kurang
6. Belum berakhirnya masa pandemi dan kurang disiplin penerapan protokol kesehatan

Kecamatan Gedangan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inofatif. Adapun Visi yang mengacu pada Visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah :

”Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”.

Sedangkan Misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kabupaten Sidoarjo dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas sehingga tujuan Organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, maka Misi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;

MISI II : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;

MISI III : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan;

MISI IV : Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya;

MISI V : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.



Dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan, penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan Publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi 1 (satu) yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”**. dan misi 5 (lima) yakni **“ Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga “**. Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap PD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran PD. Berikut dirumuskan tujuan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Untuk mendukung terselenggaranya Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD yaitu *“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha”*, Kecamatan Gedangan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Gedangan yaitu *“ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum”*.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangan

Tujuan	Indikator Tujuan	TARGET KINERJA TUJUAN						Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN					
		PADA TAHUN								PADA TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.1 (Sangat Baik)	89.1 (Sangat Baik)	89.2 (Sangat Baik)	89.3 (Sangat Baik)	89.4 (Sangat Baik)	89.5 (Sangat Baik)	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
								Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	76 (BB)	80 (A)	80.1 (A)	80.2 (A)	80.3 (A)	80.4 (A)
									Nilai RB	0	27.22	28	29	30	31
									Nilai IPP	0	4.51 (A)	4.55 (A)	4.60 (A)	4.65 (A)	4.65 (A)

Untuk mendukung terselenggaranya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD yaitu “*Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital*” dan “*Terselenggaranya*



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha” maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Gedangan yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.

Kecamatan Gedangan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN GEDANGAN

Strategi Pembangunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan tahun 2021-2026 sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan.

Strategi pembangunan adalah cara/pendekatan/kebijakan/tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, rumusan strategi pembangunan selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan Arah Kebijakan pembangunan tahunan selama lima tahun periode Renstra. Dengan demikian, agar dapat dihasilkan Arah Kebijakan Pembangunan tahunan tersebut, perlu disusun Strategi, yang menggambarkan mengenai cara / pendekatan / kebijakan / tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Gedangan.

Untuk peningkatan kinerja Kecamatan secara umum dan guna mewujudkan visi dan misinya serta mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan Strategi sebagai berikut :

- a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal;
- b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan;
- e. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan;
- f. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan;



- g. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai;
- h. Meningkatkan partisipatif masyarakat.

Strategi Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 di atas, menjadi pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan Arah Kebijakan guna setiap misi Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026. Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Gedangan selama periode Tahun 2016 - 2021 yang tertuang pada Matrik Rancangan Akhir Renstra 2016 - 2021 pada lampiran 1.

Kebijakan Kecamatan Gedangan untuk 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
2. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif;
3. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/kelurahan serta masyarakat;
4. Mengembangkan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan
Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan				
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha				
MISI 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	a.Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal; b.Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan; c.Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan; d.Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan; e.Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan; f.Memberikan sarana dan prasarana yang memadai; g.Meningkatkan partisipatif masyarakat	1.Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 2.Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif 3.Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/ kelurahan serta masyarakat	1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan	Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Penjelasan urutan dari Visi, Misi, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Program masing-masing bagian terkait di Kecamatan Gedangan dijelaskan dalam tata urutan dan korelasi pada Matrik Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan yang terlampir pada Lampiran.1

5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GEDANGAN

Program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gedangan pada Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja organisasi akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai. Untuk itu tentunya diperlukan suatu program dan kegiatan yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Program dan Kegiatan Kecamatan Gedangan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian



tujuan dan sasaran serta memberikan sumbangan bagi pencapaian misi Kecamatan Gedangan. Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Akhir Renstra Kantor Kecamatan Gedangan ini merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Kantor Kecamatan Gedangan dalam merealisasikan program kerja operasionalnya. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gedangan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan program terkait Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan serta melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan melaksanakan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya RPJMD 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka langkah operasional dan pengendalian di Kecamatan Gedangan telah dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan aspek operasional dari suatu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi Perangkat Daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi bagian dan seksi di Kecamatan Gedangan dalam tugas pokoknya, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun rencana program dan kegiatan didalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dapat dilihat di dalam table Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo

Masi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28		
Menajukan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan lain-lain	a. 100% b. 80% c. 100%	a. 100% b. 80% c. 100%	1.951.043.903	a. 100% b. 80% c. 100%	845.504.326	a. 0% b. 85% c. 100%	554.707.780	a. 0% b. 85% c. 100%	1.646.876.102	a. 0% b. 85% c. 100%	1.811.563.712	a. 0% b. 85% c. 100%	1.992.720.084	a. 0% b. 85% c. 100%	2.114.773.253	Kecamatan Gedangan	Camat
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	9600 Berkas 9600 Berkas	39.427.700	9600 Berkas 9600 Berkas	52.890.030	9600 Berkas 9600 Berkas	134.237.500	9600 Berkas 9600 Berkas	147.861.250	10000 Berkas 10000 Berkas	162.427.375	12000 Berkas 12000 Berkas	178.670.113	12000 Berkas 12000 Berkas	196.537.124	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah pelayanan umum yang diterima b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	a. 9600 Berkas b. 60 Orang	a. 9600 Berkas b. 60 Orang	39.427.700	a. 9600 Berkas b. 60 Orang	52.890.030	a. 9600 Berkas b. 100 Orang	0	a. 9800 Berkas b. 100 Orang	0	a. 10000 Berkas b. 100 Orang	0	a. 12000 Berkas b. 100 Orang	0	a. 12000 Berkas b. 100 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	1 Laporan	134.237.500	1 Laporan	147.861.250	1 Laporan	147.861.250	1 Laporan	162.427.375	1 Laporan	178.670.113	1 Laporan	196.537.124	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan hamasyarakat, pembangunan dan lingkungan hidup, pemerintahan dan perekonomian yang disusun	8 Laporan 8 Laporan	8 Laporan 8 Laporan	215.088.100	8 Laporan 8 Laporan	430.062.500	8 Laporan 8 Laporan	197.337.500	8 Laporan 8 Laporan	217.071.250	8 Laporan 8 Laporan	238.778.375	8 Laporan 8 Laporan	262.656.213	8 Laporan 8 Laporan	288.921.834	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kasos d. Kasi Pembangunan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan d. Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	215.088.100	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	430.062.500	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	a. 4 kegiatan b. 2 kegiatan c. 4 kegiatan d. 2 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kasos d. Kasi Pembangunan	
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	0	4 Laporan	197.337.500	4 Laporan	197.337.500	4 Laporan	217.071.250	4 Laporan	238.778.375	4 Laporan	262.656.213	4 Laporan	288.921.834	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kasos d. Kasi Pembangunan	



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat	1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan 2. Jumlah laporan hasil monitoring bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun 3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.896.528.103	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	362.561.796	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	223.132.780	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.282.143.602	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.410.357.962	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.551.393.759	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.620.314.295	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar	75 berkas	75 berkas	2.903.175	75 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0				1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	a. Jumlah monitoring bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan b. Jumlah monitoring bidang pembangunan dan lingkungan c. Jumlah monitoring bidang pemerintahan d. Jumlah monitoring bidang perekonomian	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	1.500.000	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kosos d. Kasi Pembangunan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	0				4 Laporan	75.500.000	4 Laporan	83.050.000	4 Laporan	91.355.000	4 Laporan	100.490.500	4 Laporan	33.320.711	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kosos	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Diimpahkan	a. Jumlah kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang telah dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan c. Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	1.692.124.928	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	362.561.796	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	a. 1 kegiatan b. 3 kegiatan c. 1 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Perekonomian b. Kasi Pembangunan c. Kasi Kelembagaan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diimpahkan	0				8 Laporan	147.632.780	2 Laporan	1.199.093.602	2 Laporan	1.319.002.962	2 Laporan	1.450.903.259	2 Laporan	1.595.993.584	Kecamatan Gedangan	Kasi Perekonomian	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100.325.368	100%	59.077.000	100%	387.810.500	100%	426.591.550	100%	469.250.705	100%	516.175.776	100%	567.793.353	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				20	21	22	23	24	25	26									
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.325.368	2 Kegiatan	50.077.000	2 Kegiatan	387.810.500	1 Kegiatan	426.501.550	1 Kegiatan	460.250.705	1 Kegiatan	516.175.776	1 Kegiatan	567.703.353	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan b. Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	100.325.368	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	50.077.000	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0					100 Orang	86.810.500	100 Orang	95.491.550	100 Orang	105.040.705	100 Orang	115.544.776	100 Orang	127.099.253	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan FORKOPIMKA yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	2 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0					1 Dokumen	150.500.000	1 Dokumen	165.550.000	1 Dokumen	182.105.000	1 Dokumen	200.315.500	1 Dokumen	220.347.050	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas pilkada, pilgub, pilpres	15 Desa	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	15 Desa	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	0					3 Lembaga Masyarakat	150.500.000	3 Lembaga Masyarakat	165.550.000	3 Lembaga Masyarakat	182.105.000	3 Lembaga Masyarakat	200.315.500	3 Lembaga Masyarakat	220.347.050	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	26.613.300	100%	41.650.000	100%	540.300.000	100%	504.330.000	100%	663.763.000	100%	710.130.300	100%	791.053.230	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
	Facilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	15 Desa	15 Desa	26.613.300	15 Desa	41.650.000	15 Desa	540.300.000	15 Desa	504.330.000	15 Desa	663.763.000	15 Desa	710.130.300	15 Desa	791.053.230	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi	a. 15 desa b. 15 Desa	a. 15 desa b. 15 Desa	8.810.400	a. 15 desa b. 15 Desa	20.825.000	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	a. 15 desa b. 15 Desa	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0					2 Dokumen	233.300.000	2 Dokumen	256.630.000	2 Dokumen	282.293.000	2 Dokumen	310.522.300	2 Dokumen	341.574.530	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	17.802.900	15 Kegiatan	20.825.000	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0					4 Dokumen	153.500.000	4 Dokumen	168.850.000	4 Dokumen	185.735.000	4 Dokumen	204.308.500	4 Dokumen	224.739.350	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
	Facilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0					4 Dokumen	153.500.000	4 Dokumen	168.850.000	4 Dokumen	185.735.000	4 Dokumen	204.308.500	4 Dokumen	224.739.350	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparat perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	4.909.220.779	100%	5.216.537.969	100%	8.412.762.618	100%	17.018.354.778	100%	18.720.190.257	100%	20.592.209.282	100%	22.651.430.211	Kecamatan Gedangan	Sekretariat
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang diindaklanjuti	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	51.273.418	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	33.860.000	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
		1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	0					1. 7 Dokumen 2. 6 Dokumen	54.150.000	1. 7 Dokumen 2. 6 Dokumen	59.665.000	1. 7 Dokumen 2. 6 Dokumen	65.521.500	1. 7 Dokumen 2. 6 Dokumen	72.073.650	1. 7 Dokumen 2. 6 Dokumen	79.281.015	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Date Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28		
		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.300.000	1 Dokumen	3.630.000	1 Dokumen	3.993.000	1 Dokumen	4.392.300	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.300.000	1 Dokumen	3.630.000	1 Dokumen	3.993.000	1 Dokumen	4.392.300	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.300.000	1 Dokumen	3.630.000	1 Dokumen	3.993.000	1 Dokumen	4.392.300	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	616.785	2 dokumen	3.320.000	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0			2 Laporan	41.910.000	2 Laporan	46.101.000	2 Laporan	50.711.100	2 Laporan	55.782.210	2 Laporan	61.380.431	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen money PD yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	656.833	4 Dokumen	30.540.000	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0			4 Laporan	3.240.000	4 Laporan	3.564.000	4 Laporan	3.920.400	4 Laporan	4.312.440	4 Laporan	4.743.684	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase realisasi anggaran PD	90%	90%	3.630.528.362	90%	3.285.794.237	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target
1	18	19	20			21		22		23		24		25		26		27	28	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	0					90%	3.740.573.650	90%	4.114.631.015	90%	4.526.094.117	90%	4.978.703.528	90%	5.476.573.881	Kecamatan Gedangan	Kesubag Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang	3.629.470.967	25 Orang	3.282.534.237	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kesubag Perencanaan dan Keuangan	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0					25 Orang/bulan	3.659.393.650	25 Orang/bulan	4.025.333.015	25 Orang/bulan	4.427.866.317	25 Orang/bulan	4.870.652.948	25 Orang/bulan	5.357.718.243	Kecamatan Gedangan	Kesubag Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kesubag Perencanaan dan Keuangan	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0					1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kesubag Perencanaan dan Keuangan	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 SPM	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	Kecamatan Gedangan	Kesubag Perencanaan dan Keuangan	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0					1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kesubag Perencanaan dan Keuangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kesubag Perencanaan dan Keuangan	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0					1 Laporan	75.500.000	1 Laporan	83.050.000	1 Laporan	91.355.000	1 Laporan	100.490.500	1 Laporan	110.539.550	Kecamatan Gedangan	Kesubag Perencanaan dan Keuangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.057.395	12 Laporan	3.280.000	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kesubag Perencanaan dan Keuangan	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan					12 Laporan	5.680.000	12 Laporan	6.248.000	12 Laporan	6.872.800	12 Laporan	7.560.080	12 Laporan	8.316.088	Kecamatan Gedangan	Kesubag Perencanaan dan Keuangan	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD PD yang telah registrasi 2. Persentase BMD PD yang telah tersertifikasi	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	5.452.005	a. 90% b. 90%	1.888.000	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
			1. Persentase BMD SKPD yang telah registrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	a. 0% b. 0%				a. 90% b. 0%	80.468.000	a. 90% b. 0%	88.514.800	a. 90% b. 0%	97.386.280	a. 90% b. 0%	107.102.908	a. 90% b. 0%	117.813.199	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD PD yang disusun tepat waktu	3 Laporan	3 Laporan	5.452.005	3 Laporan	1.888.000	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi/Budget	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Date Capaian pada Tahun Awal Pemecanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
		Jumlah Laporan Pemantauan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	75.500.000	4 Laporan	83.050.000	4 Laporan	91.355.000	4 Laporan	100.490.500	4 Laporan	110.539.550	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0			4 Laporan	4.968.000	4 Laporan	5.464.800	4 Laporan	6.011.280	4 Laporan	6.612.408	4 Laporan	7.273.649	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase alat dan bahan penunjang yang disediakan	90%	90%	305.072.175	90%	510.710.916	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0			80,1 Nilai	917.130.538	80,1 Nilai	1.008.843.502	80,1 Nilai	1.109.727.951	80,1 Nilai	1.220.700.746	80,1 Nilai	1.342.770.821	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	124 Buah	124 Buah	4.145.937	124 Buah	14.252.345	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0			7 Paket	20.737.575	1 Paket	22.811.333	1 Paket	25.092.466	1 Paket	27.601.712	1 Paket	30.361.884	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	13 buah	13 buah	48.898.809	645 Buah	173.291.998	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0			6 Paket	436.800.963	7 Paket	480.481.059	7 Paket	528.529.165	7 Paket	581.382.082	7 Paket	639.520.290	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0			1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	1. 8 Orang 2. 0	1. 8 Orang 2. 0	132.000.000	1. 8 Orang 2. 0	129.750.000	1. 8 Orang 2. 0	0	1. 8 Orang 2. 0	0	1. 8 Orang 2. 0	0	1. 8 Orang 2. 0	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0			2 Paket	136.040.000	1 Paket	149.644.000	1 Paket	164.608.400	1 Paket	181.060.240	1 Paket	199.176.164	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	2.352.038	600 Buah	1.800.000	600 Buah	0	600 Buah	0	600 Buah	0	600 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0			2 Paket	7.557.000	1 Paket	8.312.700	1 Paket	9.143.970	1 Paket	10.058.367	1 Paket	11.064.204	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3.182.820	3 Jenis	3.980.000	3 Jenis	0	3 Jenis	0	3 Jenis	0	3 Jenis	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0			3 Dokumen	2.700.000	3 Dokumen	2.970.000	3 Dokumen	3.267.000	3 Dokumen	3.593.700	3 Dokumen	3.953.070	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	4 Laporan	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0			0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jaman rapat/tamu yang disediakan b. Presentase kunjungan tamu yang difasilitasi	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	39.092.960	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	65.225.000	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0			4 Laporan	135.495.000	4 Laporan	149.044.500	4 Laporan	163.948.950	4 Laporan	180.343.845	4 Laporan	198.378.230	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	100%	75.399.611	100%	122.411.573	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0			12 Laporan	177.800.000	12 Laporan	195.580.000	12 Laporan	215.138.000	12 Laporan	236.651.800	12 Laporan	260.316.980	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	65 Buah	65 Buah	0	65 Buah	287.434.673	65 Buah	0	65 Buah	0	65 Buah	0	65 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Jumlah BMD yang diadakan	0			108 Jenis	1.576.769.430	108 Jenis	9.470.987.271	108 Jenis	10.418.085.999	108 Jenis	11.450.894.598	108 Jenis	12.605.884.059	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	0	N/A Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0			1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0			2 Unit	88.800.000	2 Unit	97.680.000	2 Unit	107.448.000	2 Unit	118.192.800	2 Unit	130.012.080	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0			1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	23 Buah	23 Buah	0	100 Buah	40.495.220	23 Buah	0	23 Buah	0	23 Buah	0	23 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0			100 Unit	540.161.520	107 Unit	594.177.672	107 Unit	653.595.439	107 Unit	718.954.983	107 Unit	790.850.481	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Mak Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	70 Buah	70 Buah	0	10 Buah	246.939.653	70 Buah	0	70 Buah	0	70 Buah	0	70 Buah	0	70 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0					8 Unit	760.994.910	59 Unit	837.094.401	59 Unit	920.803.841	59 Unit	1.012.884.225	59 Unit	1.114.172.648	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Gedung	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	1 Gedung	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0					1 Unit	186.813.000	1 Unit	7.942.035.198	1 Unit	8.736.238.719	1 Unit	9.609.882.590	1 Unit	10.570.848.850	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	90%	90%	812.790.200	90%	841.849.943	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	0					90%	1.220.796.000	90%	1.342.875.600	90%	1.477.163.160	90%	1.624.870.476	90%	1.787.367.424	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1700 Surat	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	1700 Surat	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0					1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	12 bulan	119.600.000	12 bulan	155.400.743	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0					12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	176.000.000	12 Laporan	193.600.000	12 Laporan	212.980.000	12 Laporan	234.256.000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	90%	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0					1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; 4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	693.190.200	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	686.449.200	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	0	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0					12 Laporan	1.060.796.000	12 Laporan	1.166.875.600	12 Laporan	1.283.563.160	12 Laporan	1.411.919.476	12 Laporan	1.553.111.424	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	60 Unit	60 Unit	104.104.619	60 Unit	255.000.000	60 Unit	0	60 Unit	0	60 Unit	0	60 Unit	0	60 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28		
		Perawatan Belang Milk Daerah Persegi Panjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	0					80%	798.125.000	80%	877.937.500	80%	965.731.250	80%	1.062.904.375	80%	1.168.534.813	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit		1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0					16 Unit	0	16 Unit	0	16 Unit	0	16 Unit	0	16 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	40.104.619	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	35.000.000	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	0	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0					16 Unit	122.500.000	16 Unit	134.750.000	16 Unit	148.225.000	16 Unit	163.047.500	16 Unit	179.352.250	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	a. Jumlah Alat Besar yang dipelihara b. Jumlah Alat Besar yang durus perizinannya	a. 0 Unit b. 0 Unit	a. 0 Unit b. 0 Unit	0	a. 0 Unit b. 0 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0					0 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	a. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara b. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang durus perizinannya	a. 0 Unit b. 0 Unit	a. 0 Unit b. 0 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	a. 1 Unit b. 1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit					0 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	50 buah	50 buah	5.000.000	50 buah	5.000.000	100 buah	0	150 buah	0	200 buah	0	300 buah	0	400 buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0					2 Unit	40.000.000	34 Unit	44.000.000	34 Unit	48.400.000	34 Unit	53.240.000	34 Unit	58.564.000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 buah	13 buah	0	13 buah	85.000.000	25 buah	0	25 buah	0	50 buah	0	50 buah	0	50 buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawain



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Paranggung jawab	Keterangan		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0			4 Unit	310.000.000	11 Unit	341.000.000	11 Unit	375.100.000	11 Unit	412.610.000	11 Unit	453.871.000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/ rumah dinas/ jabatan yang dipelihara/ rehabilitasi	120 M2	120 M2	59.000.000	120 M2	130.000.000	120 M2	0	120 M2	0	120 M2	0	120 M2	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	0			2 Unit	325.625.000	1 Unit	358.187.500	1 Unit	394.006.250	1 Unit	433.406.875	1 Unit	476.747.563	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bermanfaat	a. 100% b. 80%	a. 100% b. 80%	0	a. 100% b. 80%	0	a. 100% b. 0%	24.750.000	a. 100% b. 80%	55.000.000	a. 100% b. 80%	60.500.000	a. 100% b. 80%	66.950.000	a. 100% b. 80%	73.205.000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakain dinas harian (PDH) yang diadakan	26 Stel	26 Stel	0	26 Stel	0	26 Stel	0	26 Stel	0	26 Stel	0	26 Stel	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0			1 Paket	24.750.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.500.000	1 Paket	66.950.000	1 Paket	73.205.000	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	75 Orang	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang			75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	75 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Agama serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran Perda dan Parkada yang ditangani	100%	100%	339.948.897	100%	327.379.000	100%	720.979.000	100%	793.076.900	100%	872.384.500	100%	959.623.049	100%	1.055.585.354	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Trantib b. Kasi Kesos
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang beresam	4 Laporan	4 Laporan	339.948.897	4 Laporan	327.379.000	4 Laporan	567.479.000	4 Laporan	624.226.900	4 Laporan	686.649.590	4 Laporan	755.314.549	4 Laporan	830.846.004	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Trantib b. Kasi Kesos
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	a. Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan Limmas yang dilaksanakan	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	237.516.700	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	215.454.000	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	a. 2 Kegiatan b. 2 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0			4 Laporan	340.254.000	4 Laporan	374.279.400	4 Laporan	411.707.340	4 Laporan	452.878.074	4 Laporan	498.165.881	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib		
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	102.432.197	3 Kegiatan	111.925.000	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Kesos



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Misi Bupati	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0					12 Laporan	227.225.000	3 Laporan	249.947.500	3 Laporan	274.942.250	3 Laporan	302.436.475	3 Laporan	332.680.123	Kecamatan Gedangan	Kasi Kesos
	Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	4 permasalahan	4 permasalahan	0	4 permasalahan	0	4 permasalahan	153.500.000	4 permasalahan	168.850.000	4 permasalahan	185.735.000	4 permasalahan	204.308.500	4 permasalahan	224.739.350	Kecamatan Gedangan	Kasi Tiantib
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah operasi penegakan dan pelaksanaan Perda dan Perkada yang dilaksanakan b. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar c. Jumlah monv bidang ketertaman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	a. 12 kegiatan b. 4 permasalahan c. 4 kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Tiantib
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0					4 Laporan	153.500.000	4 Laporan	168.850.000	4 Laporan	185.735.000	4 Laporan	204.308.500	4 Laporan	224.739.350	Kecamatan Gedangan	Kasi Tiantib



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja Perangkat Daerah yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Startegis Organisasi. Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinaergi dengan fungsi tugas dari Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Misi 1 pada RPJMD: Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha									Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Peanggung jawab	Sumber Data
Sasaran Misi 5 pada RPJMD Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram												
Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Target capaian kinerja						Kondisi Kinerja Akhir				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026			
Sasaran I: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum												
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan}}{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang difasilitasi}} * 100\%$	Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Laporan Masyarakat
Sasaran II: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan												
Nilai SAKIP	70,9 (BB)	76 (BB)	80 (A)	80.1 (A)	80.2 (A)	80.3 (A)	80.4 (A)	80.4 (A)	1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut: 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90 3. BB untuk hasil nilai 70-80	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	LHE SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

									Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat	4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30		
Nilai RB	0	0	27.22	28	29	30	31	31	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Mengisi LKE dari inspektorat.	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE RB
Nilai IPP	0	0	4.51 (A)	4.55 (A)	4.60 (A)	4.65 (A)	4.65 (A)	4.65 (A)	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik	Indeks penilaian sebagai berikut: a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE IPP

Kecamatan



BAB VIII PENUTUP

Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan sampai dengan Tahun 2026 dan juga dapat digunakan sebagai pedoman transisi yaitu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Tahun 2026, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan pada saat transisi penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan periode berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Rancangan Akhir Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Gedangan ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Gedangan harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Sidoarjo, 31 Mei 2023
CAMAT GEDANGAN



INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Pembina Tingkat I

NIP. 19770924 199701 2001



LAMPIRAN

1. Matriks Reviu Rancangan Akhir Renstra 2021-2026
2. Form E.73
3. Form E.80
4. SOP Mekanisme Reviu Rancangan Akhir Renstra 2021-2026

MATRIKS RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program kegiatan (intermediate output) / Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah (2024)											
																							Target	Re	Target	Re	Target	Re	Target	Re	Target	Re	Target	Re	Target	Re									
				1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, ketenteraman dan ketertiban umum	Nilai SKM Kecamatan	89,072	89,1	89,1	89,2	89,3	89,4	89,5	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	0	0	89,1 (Sangat Baik)	0	0	0	0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pelayanan lintas lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	a.100% b.80% c.100%	a.100% b.80% c.100%	1.991.043.903	a.100% b.80% c.100%	845.504.326	a.0% b.85% c.100%	554.707.780	a.0% b.85% c.100%	1.646.876.102	a.0% b.85% c.100%	1.811.563.712	a.0% b.85% c.100%	1.992.720.084	a.0% b.85% c.100%	2.114.773.253										
		Nilai SKM Kecamatan	89,072 (Sangat Baik)	89,1 (Sangat Baik)	89,1 (Sangat Baik)	89,2 (Sangat Baik)	89,3 (Sangat Baik)	89,4 (Sangat Baik)	89,5 (Sangat Baik)		Nilai SAKP Kecamatan	70,9	80	80	80,1	80,2	80,3	80,4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang disalurkan	9600 Berkas	9600 Berkas	39.427.700	9600 Berkas	52.880.030	9600 Berkas	134.237.500	9600 Berkas	147.661.250	10000 Berkas	162.427.375	12000 Berkas	178.670.113	12000 Berkas	196.537.124										
											Nilai SAKP Kecamatan	70,9 (BB)	76 (BB)	80 (A)	80,1 (A)	80,2 (A)	80,3 (A)	80,4 (A)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah pelayanan umum yang diterima b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	a.9600 Berkas b.60 Orang	a.9600 Berkas b.60 Orang	39.427.700	a.9600 Berkas b.60 Orang	52.880.030	a.9600 Berkas b.100 Orang	0	a.9600 Berkas b.100 Orang	0	a.10000 Berkas b.100 Orang	0	a.12000 Berkas b.100 Orang	0												
											Nilai RB	0	0	27,22	28	29	30	31		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0				1 Laporan	134.237.500	1 Laporan	147.661.250	1 Laporan	162.427.375	1 Laporan	178.670.113	1 Laporan	196.537.124											
											Nilai IPP	0	0	4,51 (A)	4,55 (A)	4,60 (A)	4,65 (A)	4,65 (A)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang dilaksanakan	8 Laporan	8 Laporan	215.088.100	8 Laporan	430.062.500	8 Laporan	197.337.500	8 Laporan	217.071.250	8 Laporan	238.778.375	8 Laporan	262.656.213	8 Laporan	288.921.834										
											Serapan Anggaran	0	0	90%	0	0	0	0	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan d. Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	215.088.100	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	430.062.500	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	0	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	0	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	0	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	0	a.4 kegiatan b.2 kegiatan c.4 kegiatan d.2 kegiatan	0										
																				Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0				4 Laporan	197.337.500	4 Laporan	217.071.250	4 Laporan	238.778.375	4 Laporan	262.656.213	4 Laporan	288.921.834											
																				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpikan kepada Camat	1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai ruzan maksimal 400m2 yang diterbitkan 2. Jumlah laporan hasil movev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, agama dan kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun 3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang terusun	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.696.528.103	1. 75 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	362.561.798	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	223.132.780	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.282.143.602	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.410.357.962	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.551.363.759	1. 0 berkas 2. 16 Laporan 3. 4 Laporan	1.629.314.295									
																				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelaporan Pelaporan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai ruzan maksimal 400m2 yang diterbitkan	75 berkas	75 berkas	2.903.175	75 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0											
																				Jumlah Dokumen Non Pelaporan Usaha yang Dilaksanakan	0				1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0											
																			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizin	a. Jumlah movev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan b. Jumlah movev bidang pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian c. Jumlah movev bidang pembinaan yang terusun	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	1.500.000	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0	a. 4 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 4 Kegiatan	0												
																			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Pelaporan pada Urusan Pemerintahan	0				4 Laporan	75.500.000	4 Laporan	83.050.000	4 Laporan	91.355.000	4 Laporan	100.490.000	4 Laporan	33.320.711												

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Areal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Areal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Areal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Parangka Daerah (2025)	Unit Kerja Parangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan																																																															
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target																																																					
				Rp		Rp		Rp					Rp		Rp		Rp					Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
																	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
																	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
																	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan															
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah (2026)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40													
																	18	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang dilaksanakan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	17.822.900	15 Kegiatan	20.825.000	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	15 Kegiatan	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan													
																		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0					4 Dokumen	153.500.000	4 Dokumen	168.850.000	4 Dokumen	185.735.000	4 Dokumen	204.308.500	4 Dokumen	224.739.350	4 Dokumen	224.739.350	4 Dokumen	224.739.350	4 Dokumen	224.739.350	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan											
																		Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan								
																		Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0				4 Dokumen	153.500.000	4 Dokumen	168.850.000	4 Dokumen	185.735.000	4 Dokumen	204.308.500	4 Dokumen	224.739.350	4 Dokumen	224.739.350	4 Dokumen	224.739.350	4 Dokumen	224.739.350	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan												
																		Program Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Tingkat kepuasan aparat perangkat daerah terhadap pelayanan yang diberikan	100%	100%	4.909.220.779	100%	5.216.537.969	100%	8.412.762.618	100%	17.018.354.778	100%	18.720.190.257	100%	20.582.209.282	100%	22.651.430.211	100%	22.651.430.211	100%	22.651.430.211	100%	22.651.430.211	Kecamatan Gedangan	Sekretaris										
																		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang diterbitkan	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	51.273.418	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	33.860.000	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	0	0	0	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan										
																		1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	0				1.7 Dokumen 2. 6 Dokumen	54.150.000	1.7 Dokumen 2. 6 Dokumen	59.565.000	1.7 Dokumen 2. 6 Dokumen	65.521.500	1.7 Dokumen 2. 6 Dokumen	72.073.650	1.7 Dokumen 2. 6 Dokumen	79.281.015	1.7 Dokumen 2. 6 Dokumen	79.281.015	1.7 Dokumen 2. 6 Dokumen	79.281.015	1.7 Dokumen 2. 6 Dokumen	79.281.015	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan												
																		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan								
																		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen				2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan								
																		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						
																		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.300.000	1 Dokumen	3.630.000	1 Dokumen	3.993.000	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan								
																		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						
																		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan								
																		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						
																		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.300.000	1 Dokumen	3.630.000	1 Dokumen	3.993.000	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						
																		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						
																		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.300.000	1 Dokumen	3.630.000	1 Dokumen	3.993.000	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	1 Dokumen	4.392.300	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						
																		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	616.785	2 dokumen	3.320.000	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	2 dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
																		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mitisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitisar Realisasi Kinerja SKPD	0				2 Laporan	41.910.000	2 Laporan	46.101.000	2 Laporan	50.711.100	2 Laporan	55.782.210	2 Laporan	61.360.431	2 Laporan	61.360.431	2 Laporan	61.360.431	2 Laporan	61.360.431	2 Laporan	61.360.431	2 Laporan	61.360.431	2 Laporan	61.360.431	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						
																		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	656.633	4 Dokumen	30.540.000	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
																		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0				4 Laporan	3.240.000	4 Laporan	3.584.000	4 Laporan	3.920.400	4 Laporan	4.312.440	4 Laporan	4.743.684	4 Laporan	4.743.684	4 Laporan	4.743.684	4 Laporan	4.743.684	4 Laporan	4.743.684	4 Laporan	4.743.684	4 Laporan	4.743.684	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						
																		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	90%	90%	3.630.528.362	90%	3.285.794.237	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
																		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	0				90%	3.740.573.650	90%	4.114.631.015	90%	4.528.094.117	90%	4.978.703.528	90%	5.476.573.881	90%	5.476.573.881	90%	5.476.573.881	90%	5.476.573.881	90%	5.476.573.881	90%	5.476.573.881	90%	5.476.573.881	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Areal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Areal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Areal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Keterangan											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah (2026)										
																						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40							
																		Penyediaan Gap dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	25 Orang	25 Orang	3.623.470.967	25 Orang	3.282.534.237	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						
																		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	25 Orang	3.623.470.967	25 Orang	3.282.534.237	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	25 Orang	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan					
																		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						
																		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan					
																		Pelaksanaan Pemecatan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diberikan	100 SPM	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	100 SPM	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan						
																		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan					
																		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
																		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1 Laporan	75.500.000	1 Laporan	83.050.000	1 Laporan	91.355.000	1 Laporan	100.490.500	1 Laporan	110.539.500											Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan					
																		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	1.057.395	12 Laporan	3.260.000	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan				
																		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.680.000	12 Laporan	6.248.000	12 Laporan	6.872.800	12 Laporan	7.560.080	12 Laporan	8.316.088											Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan					
																		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD PD yang telah terregistrasi 2. Persentase BMD PD yang telah tersertifikasi	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	5.452.005	a. 90% b. 90%	1.888.000	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	a. 90% b. 90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
																		1. Persentase BMD SKPD yang telah terregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	a. 0% b. 0%	a. 90% b. 0%	80.468.000	a. 90% b. 0%	80.468.000	a. 90% b. 0%	88.514.800	a. 90% b. 0%	97.368.280	a. 90% b. 0%	107.102.908	a. 90% b. 0%	117.813.199									Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian					
																		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD PD yang disusun tepat waktu	3 Laporan	3 Laporan	5.452.005	3 Laporan	1.888.000	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
																		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	75.500.000	4 Laporan	75.500.000	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian			
																		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan 2. Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	a. 0 Laporan b. 0 Laporan	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
																		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	4 Laporan	4.968.000	4 Laporan	5.464.800	4 Laporan	6.011.280	4 Laporan	6.612.408	4 Laporan	7.273.649													Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian			
																		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosesional dan bahan penunjang yang disediakan	90%	90%	305.072.175	90%	510.710.916	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	90%	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
																		Nila Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	89.1 Nila	917.130.538	89.1 Nila	1.008.843.592	89.1 Nila	1.109.727.951	89.1 Nila	1.220.700.749	89.1 Nila	1.342.770.821													Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian			
																		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik penerangan yang tersedia	124 Buah	124 Buah	4.145.937	124 Buah	14.252.945	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	124 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
																		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	7 Paket	20.737.575	7 Paket	22.811.333	7 Paket	25.092.468	7 Paket	27.601.712	7 Paket	30.361.884													Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian			
																		Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	13 buah	13 buah	48.898.809	645 Buah	173.291.998	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	645 Buah	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
																		Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	6 Paket	436.800.963	7 Paket	480.481.059	7 Paket	528.529.165	7 Paket	581.362.082	7 Paket	639.520.290													Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian			
																		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah perlatan rumah tangga yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	5 Jenis	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
																		Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
																		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	1. 8 Orang 2. 0	1. 8 Orang 2. 0	132.000.000	1. 8 Orang 2. 0	129.750.000	1. 8 Orang 2. 0	0	1. 8 Orang 2. 0	0	1. 8 Orang 2. 0	0	1. 8 Orang 2. 0	0	1. 8 Orang 2. 0	0	1. 8 Orang 2. 0	0	1. 8 Orang 2. 0	0	1. 8 Orang 2. 0	0	1. 8 Orang 2. 0	0	1. 8 Orang 2. 0	0	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian


**Checklist Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penyusunan
Renstra
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Periode Renstra : 2021 - 2026**

RPJMD Kabupaten / Kota	Renstra - Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3a	3b	4	5	6
Visi dan Misi						
Tujuan dan Sasaran	Tujuan dan Sasaran	v		Indikator sasaran : persentase permasalahan trantibum yang difasilitasi diganti menjadi diselesaikan	Merubah indikator sasaran	Indikator sasaran : persentase permasalahan trantibum yang difasilitasi berubah menjadi persentase permasalahan trantibum yang diselesaikan
Strategi dan Kebijakan	Strategi dan Kebijakan	v		Disesuaikan dengan Tabel T-C 26 (Hal 203)	Menyesuaikan Tabel 5.1 pada Bab V	Tabel 5.1 pada bab V sudah disesuaikan dengan Tabel T-C 26
Penetapan Indikator Kinerja Daerah	Indikator Kinerja dan Sasaran Perangkat Daerah	v		- Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan telah dilimpahkan ke DPMPTSP - Penulisan target SAKIP, RB ditulis huruf beserta angka / A (90)	- Menyesuaikan target dan pendanaan terkait kegiatan perizinan - Menyesuaikan penulisan target SAKIP dan RB	- Target dan pendanaan pada matriks renstra terkait kegiatan perizinan telah disesuaikan - Target SAKIP dan RB ditulis huruf beserta angka
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan dan Dana Indikatif	v				


 CAMAT GEDANGAN

INEKE DWILSETIAWATI, S.STP, MPA
 Pembina Tingkat I

NIP. 19770924 199701 2001

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	SOP/49/438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	MEKANISME REVIU RENSTRA	Tanggal	1 Maret 2023
		Halaman	9 halaman



KECAMATAN GEDANGAN


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

MEKANISME REVIU RENSTRA

No.Dok. : SOP/49/438.7.4/2023

Tanggal Diterbitkan	: 1 Maret 2023
Revisi	: 01

Dibuat Oleh :	Ditinjau oleh :	Disetujui oleh :
		
RIZKY ROSAWATI, SE	ARDI ANINDITA, S. STP, M.Sosio	INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	SOP/49/438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	MEKANISME REVIU RENSTRA	Tanggal	1 Maret 2023
		Halaman	9 halaman

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan SOP Mekanisme Reviu Renstra adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi tim penyusun dokumen perencanaan dalam melakukan Reviu dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sehingga dokumen tersusun sesuai dengan kaidah penyusunan yang ditetapkan, dan relevan dengan alasan keberadaan Kecamatan Gedangan.


2. RUANG LINGKUP

SOP Mekanisme Reviu Renstra merupakan implementasi SAKIP pada Kecamatan Gedangan, mulai dari tahap penentuan isu – isu strategis, perumusan core business OPD, analisa SWOT, hingga kesimpulan akhir.

3. DEFINISI

Reviu Renstra adalah proses melakukan evaluasi atas dokumen Renstra yang telah disusun sebelumnya, dimana evaluasi yang dilakukan meliputi :


1. Ukuran keberhasilan yang tertuang dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
2. Indikator keberhasilan kinerja, baik untuk Tujuan, Sasaran, Program maupun Kegiatan;
3. Target yang telah ditetapkan sebelumnya
4. Capaian kinerja tahun berjalan yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja / LAKIP
5. Diharapkan reivew akan menghasilkan kualitas dokumen RENSTRA lebih baik dari sebelumnya.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	SOP/49/438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	MEKANISME REVIU RENSTRA	Tanggal	1 Maret 2023
		Halaman	9 halaman

4. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam SOP Mekanisme Reviu Renstra antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
- g. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
- j. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyerdehaan Birokrasi

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	SOP/49/438.7.4/2023
	MEKANISME REVIU RENSTRA	No. Rev.	01
		Tanggal	1 Maret 2023
		Halaman	9 halaman

5. TANGGUNG JAWAB

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Reviu Renstra adalah sebagai berikut :

5.1 Ketua


Ketua adalah jabatan yang diperankan oleh Camat Gedangan dengan tugas dan kewajiban antara lain :

- a. Memberikan pengarahan kepada tim Reviu Renstra secara langsung maupun berjenjang berupa kebijakan dan peraturan daerah berkaitan dengan implementasi SAKIP dan informasi-informasi lain yang dianggap perlu.
- b. Meminta keterangan/informasi dari tim Reviu Renstra baik secara langsung maupun berjenjang tentang perkembangan pelaksanaan Reviu Renstra.
- c. Menandatangani laporan hasil Reviu Renstra yang diajukan setelah melalui proses analisa dan pembahasan secara berjenjang dan menyampaikan laporan hasil Reviu Renstra.

5.2 Sekretaris

Sekretaris adalah jabatan yang diperankan oleh Sekretaris Camat dengan tugas dan kewajiban antara lain :

- a. Memastikan pemberitahuan akan dilaksanakan Reviu telah terkirim kepada masing-masing pelaksana kegiatan;
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pemanfaatan sarana-prasarana penunjang untuk melaksanakan Reviu Renstra antara lain sarana mobilisasi, alat-alat ukur, ATK dll;
- c. Membantu ketua untuk memperoleh informasi awal yang diperlukan dari tim Reviu Renstra;
- d. Membantu ketua untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada tim Reviu Renstra;
- e. Membantu penanggungjawab untuk melakukan reviu atas laporan hasil Reviu Renstra;


	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	SOP/49/438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	MEKANISME REVIU RENSTRA	Tanggal	1 Maret 2023
		Halaman	9 halaman

- f. Memverifikasi laporan hasil Reviu Renstra;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua dalam rangka kelancaran Reviu Renstra.

5.3 Anggota

Anggota adalah jabatan yang diperankan oleh Kasubag Perencanaan & Keuangan dengan tugas dan kewajiban antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan Reviu Renstra yang dihadiri oleh seluruh pelaksana kegiatan
- b. Memberikan pertimbangan yang diperlukan atas permasalahan yang dijumpai pada Reviu Renstra, dengan memberikan penjelasan teknis.
- c. Melakukan komunikasi dengan ketua atas permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan Reviu Renstra, untuk memastikan proses Reviu Renstra berjalan dengan lancar.
- d. Melakukan reviu dan validasi atas usulan perubahan dari masing-masing pelaksana kegiatan, dengan menilai kecukupan relevansinya dengan kaidah penyusunan yang ada.
- e. Selanjutnya menyampaikan keputusan dimaksud kepada Camat Gedangan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua dalam rangka kelancaran Reviu Renstra.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	SOP/49/438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	MEKANISME REVIU RENSTRA	Tanggal	1 Maret 2023
		Halaman	9 halaman

6. URAIAN PROSEDUR

1.	Camat memerintahkan seluruh pelaksana kegiatan untuk melakukan Reviu kinerjanya
2.	Pejabat / Staf Perencanaan membuat draft perubahan renstra
3.	Pejabat / Staf Perencanaan menghimpun draft perubahan renstra
4.	Sekretaris Camat memerintahkan dan memimpin rapat pembahasan Reviu renstra
5.	Camat menganalisa dan melakukan pembahasan usulan perubahan
6.	Pejabat / Staf Perencanaan menyampaikan usulan perubahan kepada Bappeda
7.	Usulan perubahan Renstra dibahas bersama oleh Tim Verifikator
8.	Penyampaian hasil pembahasan oleh Tim Verifikator
9.	Konsolidasi hasil pembahasan oleh Camat
10.	Pejabat / Staf Perencanaan menyusun laporan perubahan renstra



**STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

MEKANISME REVIU RENSTRA

No. Dok.

SOP/49/438.7.4/2023

No. Rev.

01

Tanggal


1 Maret 2023


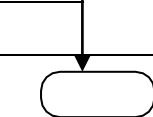
Halaman


9 halaman

7. ALUR SOP

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			KET
		Kepala OPD	Sekretaris OPD	Pejabat / Staf Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk melakukan Reviu terhadap kinerja masing - masing				Capaian Kinerja	1 Hari	Usulan	
2.	Membuat draft konsep usulan perubahan				Konsep Usulan	1 Hari	Format	
3.	Menghimpun konsep usulan perubahan				Draft	1 Hari	Usulan Perubahan	
4.	Mengadakan rapat pembahasan Reviu Renstra				Seluruh ASN	1 Hari	Laporan Rapat	
5.	Analisa dan Pembahasan usulan perubahan				Laporan Rapat	1 Hari	Rancangan Perubahan	
6.	Penyampaian usulan perubahan kepada Bappeda				Rancangan Perubahan	1 Hari	Surat pengiriman ke Bappeda	
7.	Pembahasan dengan Tim (Bappeda, Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Organisasi)				Undangan dari Bappeda	1 Hari	Berita Acara Hasil Reviu	
8.	Evaluasi dan Analisa dari hasil pembahasan dengan Tim				Berita Acara Hasil Reviu	1 Hari	Berita Acara Hasil Reviu	

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	SOP/49/438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	MEKANISME REVIU RENSTRA	Tanggal	1 Maret 2023
		Halaman	9 halaman

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			KET
		Kepala OPD	Sekretaris OPD	Pejabat / Staf Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Konsolidasi hasil pembahasan dengan seluruh ASN				Berita Acara Hasil Reviu	1 Hari	Laporan Rapat	
10.	Penyusunan laporan perubahan Renstra				Laporan Rapat	1 Hari	Renstra Perubahan	

	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok.	SOP/49/438.7.4/2023
		No. Rev.	01
	MEKANISME REVIU RENSTRA	Tanggal	1 Maret 2023
		Halaman	9 halaman

8. CATATAN MUTU

Dokumen pendukung yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini :

- a. Laporan Kinerja OPD
- b. Laporan Kinerja Individu
- c. Matriks Reviu Renstra 2021-2026


Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Periode Pelaksanaan Tahun 2023

FORM E-80


NO	Sasaran Strategis (IKU)	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Target	Realisasi			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022))	Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah 1/6 tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 1/6 tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 1/6 tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp.							K	Rp.	K	Rp.						K	Rp.				
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM Nilai SAKIP Nilai IPP Nilai RB Presentase Sarjana Anggaran	Nilai	89,1 80 4,53 27,22 90	89,1 80 4,53 27,22 90							I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum	Presentase permasalahan ketertarikan dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	100	100							K				50	Rp 2.591.668.403	50,00%	50,68%	154,17	Rp 5.358.214.140	100,00%	7,67%	Kecamatan Gedangan		
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan Gedangan																									
	701	KECAMATAN																								
	70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretarian	%	100	Rp 69.891.399.902	104,12	Rp 2.766.545.737	100	Rp 5.113.587.531	25	Rp 933.217.870	25	Rp 1.658.450.533	0	Rp 0	50	Rp 2.591.668.403	50,00%	50,68%	154,17	Rp 5.358.214.140	100,00%	7,67%	Kecamatan Gedangan	
	70101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	a. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran b. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang	Dokumen Dokumen	5 8	Rp 0 0	0 0	Rp 600.000 0	a. 5 b. 8	Rp 870.000 0	3 5	Rp 381.300 0	1 1	Rp 218.700 0	0 0	Rp 0 0	0 6	Rp 600.000 0	0,00% 0,00%	68,97% 0,00%	6 6	Rp 2.767.145.737 0	0,00% 75,00%	0,00%		
	7010120104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 270.000	1	Rp 270.000	1	Rp 270.000	1	Rp 66.300	0	Rp 203.700	0	Rp 0	1	Rp 270.000	100,00%	100,00%	2	Rp 2.766.815.737	100,00%	1,024,746,57%		
	7010120105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 270.000	1	Rp 0	1	Rp 270.000	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0	Rp 0	0,00%	0,00%	1	Rp 2.766.545.737	100,00%	1,024,646,57%		
	7010120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	Rp 330.000	2	Rp 330.000	2	Rp 330.000	2	Rp 315.000	0	Rp 15.000	0	Rp 0	2	Rp 330.000	100,00%	100,00%	4	Rp 2.766.875.737	100,00%	838,447,19%		
	70101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	90	0	93,45	Rp 1.861.670.698	90	Rp 3.444.685.113	25	Rp 503.423.369	29,82	Rp 1.248.794.555	0	Rp 0	54,82	Rp 1.752.217.924	60,91%	50,87%	148,27	Rp 4.518.763.661	100,00%	0,00%		
	7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	25	Rp 3.441.855.113	25	Rp 1.859.340.698	25	Rp 3.441.855.113	25	Rp 502.093.369	25	Rp 1.247.794.555	0	Rp 0	50	Rp 1.749.887.924	100,00%	50,84%	75	Rp 4.516.433.661	100,00%	131,22%		
	7010120207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	Rp 2.830.000	12	Rp 2.330.000	12	Rp 2.830.000	3	Rp 1.330.000	3	Rp 1.000.000	0	Rp 0	6	Rp 2.330.000	50,00%	82,33%	18	Rp 2.768.875.737	100,00%	97,840,13%		
	70101203	Administrasi Barang Milik Daerah pada	a. Presentase BMD PD yang telah terregistrasi b. Presentase BMD PD yang telah tersertifikasi	% %	90 0	Rp 0 0	90 0	Rp 621.000 0	a. 25 b. 0	Rp 768.000 0	25 0	Rp 96.000 0	25 0	Rp 525.000 0	0 0	Rp 0 0	50 0	Rp 621.000 0	0,00% 0,00%	80,86% 0,00%	140 0	Rp 2.767.166.737 0	100,00% 0,00%	0,00%		
	7010120305	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Rp 768.000	4	Rp 621.000	4	Rp 768.000	1	Rp 96.000	1	Rp 525.000	0	Rp 0	2	Rp 621.000	50,00%	80,86%	6	Rp 2.767.166.737	100,00%	360,308,17%		
	70101204	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	89,4	Rp 0	95,75	Rp 169.615.155	89,1	Rp 347.935.659	0	Rp 80.650.880	97,29	Rp 83.704.275	0	Rp 0	97,29	Rp 164.355.155	100,00%	47,24%	193,04	Rp 2.930.900.892	100,00%	0,00%		
	7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	Rp 10.504.485	0	Rp 5.510.000	7	Rp 9.463.500		Rp 5.510.000	5	Rp 0	0	Rp 0	5	Rp 5.510.000	71,43%	58,22%	5	Rp 2.772.055.737	0,00%	26,389,26%		
	7010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	Rp 28.807.795	0	Rp 16.517.275	6	Rp 25.952.968	1	Rp 220.000	5	Rp 16.297.275	0	Rp 0	6	Rp 16.517.275	100,00%	63,64%	6	Rp 2.783.063.012	85,71%	9,660,80%		
	7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 136.040.000	0	Rp 57.400.000	2	Rp 136.040.000	2	Rp 28.450.000	2	Rp 28.950.000	0	Rp 0	4	Rp 57.400.000	100,00%	42,19%	4	Rp 2.823.945.737	100,00%	2,075,82%		
	7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Rp 4.000.000	0	Rp 2.350.000	1	Rp 4.000.000	1	Rp 850.000	1	Rp 1.500.000	0	Rp 0	2	Rp 2.350.000	100,00%	58,75%	2	Rp 2.768.895.737	100,00%	69,222,39%		
	7010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	Rp 1.920.000	0	Rp 900.000	3	Rp 1.920.000	3	Rp 450.000	3	Rp 450.000	0	Rp 0	3	Rp 900.000	100,00%	46,88%	3	Rp 2.767.445.737	100,00%	144,137,80%		
	7010120608	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	Rp 12.550.000	0	Rp 9.075.000	4	Rp 12.550.000	1	Rp 3.025.000	1	Rp 3.025.000	0	Rp 0	2	Rp 6.050.000	50,00%	48,21%	2	Rp 2.772.595.737	50,00%	22,092,40%		
	7010120609	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp 158.009.191	0	Rp 77.862.880	12	Rp 158.009.191	3	Rp 42.145.880	3	Rp 33.482.000	0	Rp 0	6	Rp 75.627.880	50,00%	47,86%	6	Rp 2.842.173.617	50,00%	1.798,74%		
	70101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah BMD yang didakan	jenis	108	Rp 0	0	Rp 82.939.200	108	Rp 76.236.999	108	Rp 82.939.200	0	Rp 0	0	Rp 0	108	Rp 82.939.200	100,00%	108,79%	108	Rp 2.849.484.937	100,00%	0,00%		
	7010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	107	Rp 42.734.999	0	Rp 41.625.000	100	Rp 38.499.999	100	Rp 41.625.000	0	Rp 0	0	Rp 0	100	Rp 41.625.000	100,00%	108,12%	100	Rp 2.808.170.737	93,46%	6,571,13%		
	7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	59	Rp 41.888.070	0	Rp 41.314.200	8	Rp 37.737.000	8	Rp 41.314.200	0	Rp 0	0	Rp 0	8	Rp 41.314.200	100,00%	109,48%	8	Rp 2.807.859.937	13,56%	6,703,24%		
	70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Usung	Presentase terpenuhinya jasa penunjang	%	90	0	90	Rp 525.479.719	90	Rp 1.097.683.200	20	Rp 190.442.956	25	Rp 276.472.203	0	Rp 0	45	Rp 466.915.159	50,00%	42,54%	135	Rp 3.233.460.896	100,00%	0,00%		
	7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp 180.000.000	12	Rp 74.557.359	12	Rp 180.000.000	3	Rp 36.142.836	3	Rp 38.414.523	0	Rp 0	6	Rp 74.557.359	50,00%	41,42%	18	Rp 2.841.103.096	100,00%	1,578,39%		
	7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Rp 917.683.200	0	Rp 450.922.360	12	Rp 917.683.200	3	Rp 154.300.120	3	Rp 238.057.680	0	Rp 0	6	Rp 392.357.800	50,00%	42,76%	6	Rp 3.158.903.537	50,00%	344,23%		
	70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Usung	%	80	Rp 0	80	Rp 125.619.965	80	Rp 345.408.560	20	Rp 75.284.165	20	Rp 48.735.800	0	Rp 0	40	Rp 124.019.965	50,00%	85,29%	120	Rp 2.890.565.702	100,00%	0,00%		
	7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	16	Rp 25.000.000	0	Rp 15.498.760	16	Rp 25.000.000	16	Rp 5.610.760	16	Rp 9.888.000	0	Rp 0	32	Rp 15.498.760	100,00%	62,00%	32	Rp 2.782.044.497	100,00%	11,128,18%		
	7010120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	34	Rp 5.000.000	0	Rp 5.000.000	2	Rp 5.000.000	0	Rp 0	2	Rp 5.000.000	0	Rp 0	2	Rp 5.000.000	100,00%	100,00%	2	Rp 2.771.545.737	5,88%	55,430,91%		
	7010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	Rp 31.408.560	0	Rp 21.639.000	4	Rp 31.408.560	4	Rp 17.464.000	0	Rp 2.575.000	0	Rp 0	4	Rp 20.039.000	100,00%	63,80%	4	Rp 2.786.584.737	36,36%	8,872,06%		
	7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	Rp 84.000.000	0	Rp 83.482.205	2	Rp 84.000.000	1	Rp 52.209.405	0	Rp 31.272.800	0	Rp 0	1	Rp 83.482.205	50,00%	99,38%	1	Rp 2.850.027.942	100,00%	3,392,89%		
																Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)					72,18%					
																Predikat Kinerja yang Dievaluasi					S					

7010620102		Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	4	Rp 13.700.000	0	Rp 5.800.000	4	Rp 13.700.000	1	Rp 3.187.500	1	Rp 2.612.500	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 5.800.000	50,00%	42,34%	2	Rp 80.372.500	50,00%	586,66%																		
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																				100,00%																								
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																				5																								
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub-Kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)																				71,43%																								
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																				5																								
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)																				42,38%																								
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																				5B																								
Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Keuangan Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)																				71,43%																								
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																				5B																								
Total										Rp 6.326.201.470		Rp 1.024.027.120		Rp 1.886.429.383		Rp 0		Rp 0																										

30 Juni 2023



 Kepala Kecamatan
 Kecamatan Sasoreng
 S I O MBAS
 (297709241997012001)



Matriks Penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Target capaian kinerja						Kondisi Kinerja Akhir	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Peanggung jawab	Sumber Data
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026				
Sasaran I: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum												
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	Jumlah Permasalahan masalah tran yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang difasilitasi * 100%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Laporan Masyarakat
Sasaran II: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan												
Nilai SAKIP	70,9 (BB)	76 (BB)	80 (A)	80.1 (A)	80.2 (A)	80.3 (A)	80.4 (A)	80.4 (A)	1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut: 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	LHE SAKIP
Nilai RB	0	0	27.22	28	29	30	31	31	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2. Mengisi LKE dari inspektorat.	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE RB
Nilai IPP	0	0	4.51 (A)	4.55 (A)	4.60 (A)	4.65 (A)	4.65 (A)	4.65 (A)	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik	Indeks penilaian sebagai berikut: a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE IPP

									<p>Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik</p>	<p>d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)</p> <p>e. 2,51 – 3,00 C Cukup</p> <p>f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan)</p> <p>g. 3,51 – 4,00 B Baik</p> <p>h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik</p> <p>i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--